

## PENGANTAR

**A**nggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menentukan bahwa Rapat Pimpinan Nasional--disingkat Rapimnas--adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.

Sesuai dengan fungsi tersebut, Rapimnas mempunyai tiga wewenang utama, yaitu, **pertama**, untuk menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi. **Kedua**, untuk melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran. **Ketiga**, untuk membantu Dewan Pengurus Nasional memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Munas. Sepanjang agenda keorganisasian yang ada, kiranya tidak ada masalah-masalah mendasar keorganisasian yang perlu ditetapkan, kecuali harus terus-menerus melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Dalam tiga tahun pertama Periode 2004–2009, jajaran Kadin telah melakukan berbagai program dan kegiatan substansial yang cukup padat. Berbagai program dilaksanakan sejalan dengan harapan untuk mewujudkan Kadin Indonesia sebagai wakil dunia usaha dalam forum-forum penentuan kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional. Bahkan, lebih jauh lagi, memberikan warna pada visi dan misi pembangunan ekonomi jangka panjang dan menengah.

Dalam kaitan dengan visi dan misi jangka panjang dan menengah tersebut, Rapimnas Kadin 2007 difokuskan pada pembahasan pembangunan industri jangka panjang yang disebut Visi Pembangunan Industri 2030. Ini merupakan bagian integral dari Visi Pembangunan Indonesia 2030. Untuk jangka menengah, Rapimnas Kadin 2007 tanggal 25-27 Maret 2007 khusus membahas peta jalan pembangunan industri sampai 2010. Ini juga merupakan bagian dari output Kadin 2004 yang lalu, yakni roadmap infrastruktur yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia.

Dalam tahun 2007, pertumbuhan ekonomi yang dicapai 6,3 persen dinilai cukup baik dibanding pencapaian tahun 2006 sebesar 5,5 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan negara Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam) yang rata-rata 5,9 persen. Namun jika disimak lebih cermat, sesungguhnya banyak sinyal serius yang perlu mendapatkan perhatian dan bahkan cenderung rawan, yang jika tidak tertangani dengan baik dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi ke depan. Beberapa persoalan yang cukup mengemuka dewasa ini adalah kerawanan pangan yang berpotensi terjadi, ketersediaan energi yang tidak mencukupi dan kondisi infrastruktur yang makin tidak memadai, dan banyak persoalan mendasar lainnya yang perlu dibenahi. Kondisi ini pun makin terbebani karena kini Indonesia sedang menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2009, yang persiapannya akan mulai marak pada tahun 2008. Semua kondisi tersebut diprediksikan berpotensi menimbulkan "kesensitifan" yang tinggi terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah berbagai persoalan dan tantangan tersebut, Kadin Indonesia menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun 2008 dengan tema: **"Optimalisasi Peran Dunia Usaha dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Ketersediaan Energi dan Ketahanan Pangan"**.

Menjelang akhir 2007, Kadin Indonesia menyampaikan kepada pemerintah rekomendasi yang mencakup delapan permasalahan utama yang perlu penanganan intensif dalam jangka pendek. Kedelapan rekomendasi tersebut adalah:

- a. Mengimplementasikan program revitalisasi pertanian dan pedesaan.
- b. Mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki.
- c. Menghilangkan segala hambatan yang membuat produksi dalam negeri kian tersisih di pasar domestik.
- d. Mengamankan target *lifting* minyak mentah agar tekanan defisit APBN bisa diminimalisasikan; seraya mendorong diversifikasi energi, terutama meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan.
- e. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan serta perbaikan kondisi infrastruktur di luar Jawa.
- f. Menetapkan regulasi ruang lingkup dan koordinasi pemerintah tentang logistic (siapa yang mengkoordinir) agar mampu mendukung supply chain dari sektor-sektor yang export oriented dan agar dapat terintegrasi dengan sistem produksi global.
- g. Memperdalam fixed capital formation dengan meningkatkan secara signifikan porsi investasi dalam bentuk permesinan.
- h. Mengintensifkan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain memperdalam pembahasan kedelapan rekomendasi tersebut, dalam Rapimnas 2008 ini berbagai persoalan dan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dibahas sehingga dihasilkan formulasi program strategis dan kegiatan yang dapat dan layak dilaksanakan (*applicable*) sebagai acuan penanganan prioritas permasalahan bangsa yang harus segera diselesaikan, sehingga kondisi kesejahteraan masyarakat secara berangsur semakin membaik dan meningkat kualitasnya.

Dalam sambutan pembukaan Rapimnas, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menanggapi kedelapan rekomendasi tersebut dengan positif. Sejalan dengan sambutan Presiden, jajaran Kadin mengharapkan dan berupaya adanya sinergi antara pemerintah dan Kadin untuk meningkatkan dunia usaha Indonesia. Langkah-langkah dunia usaha harus mengarah pada upaya besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan ketahanan dan ketersediaan energi serta mengatasi kelangkaan pangan. Rapimnas juga menekankan perlunya upaya intensif semua pihak untuk memperkuat pasar domestik yang muaranya akan memperkuat ekonomi Indonesia. Dengan 230 juta penduduk yang meningkat daya beli dan GDP-nya dalam wilayah geografis yang luas, pasar domestik adalah potensi besar untuk mengembangkan ekonomi nasional.

Berbagai pemikiran dan rekomendasi yang dihasilkan Rapimnas Kadin 2008 tentunya akan disampaikan kepada Pemerintah, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat dunia usaha yang direpresentasikan oleh Kadin, dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang semakin pro business.

Program yang dibahas dalam Rapimnas Kadin 2008 disajikan dalam laporan ini secara keseluruhan. Keterlaksanaan program-program tersebut sangat tergantung pada komitmen pengurus setiap komite tetap mewujudkannya, baik individual maupun bersama-sama di bawah koordinasi wakil ketua umum masing-masing.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
Ketua Umum,

Mohamad S. Hidayat

# HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 2008 Jakarta, 30 Maret-1 April 2008

## I. PENDAHULUAN

### A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2007

01. Ekonomi Makro per 2007 Stabil
02. Pertumbuhan PDB
03. Kepercayaan Investor Institusional Asing
04. Kredit Meningkat, tapi *Undisbursed Loans* Tinggi
05. Tangguh jika Konsisten
06. Gejala Deindustrialisasi
07. Pola pertumbuhan berdasarkan Penggunaan
08. Daya Beli (*Purchasing Power*)
09. Ketimpangan Jawa - Luar Jawa
10. Kebijakan Fiskal
11. SBI
12. Logistik
13. Lingkungan Global

### B. PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL 2008

#### B.1. Prospek Jangka Pendek 2008

14. Peringkat Risiko Investasi
15. Kendala di Sisi Suplai
16. Pertumbuhan Sektor *Tradable* dan *Non-tradable*

#### B.2 Tantangan hingga Jangka Menengah

17. Struktur Insentif Tidak Tepat
18. Gejala Pengangguran (*Jobless Growth*)
19. Ketidak-terkaitan antara Sektor Finansial dan Sektor Riil
20. Dualisme Ekonomi
21. Hambatan Implementasi Regulasi
22. Buruknya kualitas kebijakan
23. Buruknya kerangka implementasi kebijakan lintas sektoral.

#### B.3 Daya Saing Jangka Panjang

24. Kebijakan dan Implementasi lintas sektor
25. Reformasi Administrasi Negara

#### B.4 Visi Industri Indonesia dan Rapimnas Kadin

## II KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS

### A. UMUM

### B. PERUBAHAN MENDASAR PERKEMBANGAN PANGAN

### C. SEKTOR ENERGI

### D. KONDISI INFRASTRUKTUR

### D. REKOMENDASI

#### D.1 Eksternal

26. Umum
27. Kebijakan Pangan
28. Kebijakan Energi
29. Kebijakan Infrastruktur

#### D.2 Internal

30. PP Undang-Undang Kadin
31. Penyempurnaan Keppres 80 Tahun 2003
32. Peraturan Presiden 106 Tahun 2007
33. Pembangunan Kapasitas Kadin
34. Public Private Partnership

35. Kadin sebagai Jembatan Penghubung

### **III PROGRAM KADIN 2008**

#### **A. UMUM**

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, REGULASI DAN KEBIJAKAN**

36. Program Legislasi Nasional
37. RUU tentang Logistik dan Distribusi
38. RUU Perdagangan
39. Reformasi Peraturan Perundang-undangan Perburuhan
40. RUU Jamsostek
41. Pelaksanaan UU No. 40/2004 Tentang SJSN

#### **C. INFRASTRUKTUR, LISTRIK DAN ENERGI**

42. Infrastruktur
43. Infrastruktur Perhubungan
44. Biofuel (BBN, Bahan Bakar Nabati)
45. Geotermal
46. Tenaga Surya
47. Pengembangan Energi Baru
48. Kebijakan Energi Migas
49. Peningkatan dan Percepatan Produksi Migas Nasional
50. Pelatihan Pengetahuan Migas untuk Pers dan Perbankan Sebagai Bagian dan Stakeholder
51. Peningkatan Investasi dalam Industri Hulu Migas
52. Implementasi dan Peningkatan Produk dan Jasa Dalam Negeri
53. Pelatihan Bisnis Sektor Hilir Minyak dan Gas
54. Komoditi Minyak dan Gas Bumi Dalam Peranannya Sebagai Salah Satu Sumber Energi
55. Komoditi Minyak dan Gas Bumi Dalam Peranannya Sebagai Komponen Bahan Baku Industri
56. Road Map Kebijakan Hilir Migas
57. Pembatasan Pemakaian BBM
58. Pengadaan Energi Listrik
59. Diskusi dengan Stakeholder Ketenagalistrikan
60. Industri Jasa dan Produk Kelistrikan Dalam Negeri
61. Pembentukan Komite Ad Hoc
62. Penyelesaian Konflik

#### **D. KEBIJAKAN PUBLIK**

63. Hak Kekayaan Intelektual
64. Perhimpunan Pembayar Pajak (Tax Payer Association)
65. Seminar Perpajakan
66. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
67. Kredit ke Dunia Usaha
68. Pemberantasan Penyelundupan
69. Pelayanan Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
70. Anti-Dumping
71. National Single Windows (NSW)

#### **E. INVESTASI**

72. Perbaikan Iklim Investasi
73. Regional Forum & Business Gathering

#### **F. INDUSTRI**

74. Restrukturisasi Industri
75. Revitalisasi Industri
76. Industri Sarana Transportasi

#### **G. PERTANIAN**

77. Ketahanan Pangan

- 78. Peningkatan Produksi Daging
  - 79. Beras
  - 80. Gula
  - 81. Perunggasan
  - 82. Karet
  - 83. Kelapa Sawit
  - 84. Jarak
  - 85. Teh
  - 86. Etanol dari Singkong
  - 87. Holtikultura
  - 88. Mekanisasi Pertanian
  - 89. Bioteknologi
  - 90. WTO Pertanian
- H. KELAUTAN**
- 91. Pengembangan Industri Maritim
- I. PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI**
- 92. Roadmap Perdagangan
  - 93. Sistem Distribusi Nasional
  - 94. Industri Jasa Logistik
  - 95. Pasar Modern dan Pasar Tradisional
  - 96. Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia
  - 97. Pameran dan Misi Dagang
  - 98. Kompetensi SDM
  - 99. Komunitas Daya Saing
- J. TRANSPORTASI**
- 100. Peraturan Pelaksanaan UU Pelayaran
  - 101. Perhubungan
- K. TELEKOMUNIKASI**
- 102. Seminar Industri Kreatif
  - 103. First Draft Konsep Kadin tentang Konvergensi
  - 104. Creating Kadin Shortcode for Kadin Services
  - 105. Rakornas Telematika
  - 106. Telecommunication Conference
  - 107. Penerbitan Outlook Industri
  - 108. Position Paper
  - 109. Partisipasi dalam Pokja
- L. INFORMATIKA**
- 110. Program Website / KISS
  - 111. Digital Archiving / E - Office
  - 112. Rakornas Telematika
- M. PROPERTI**
- 113. Pengembangan Prasarana
  - 114. Ekspor Jasa Konstruksi
  - 115. Peningkatan Daya Saing Kontraktor Nasional
  - 116. Kesetaraan Sertifikasi Kompetensi Profesi Jasa Konstruksi Nasional
  - 117. Regulasi Investasi Infrastruktur
  - 118. Stimulus Pajak-Pajak Properti
  - 119. Hak Kepemilikan atas Properti oleh Orang Asing
  - 120. Peningkatan Profesionalisme Pengembang
  - 121. Penciptaan Peluang Investasi Properti
  - 122. Keringanan Biaya dan Pajak-pajak Perumahan dan Permukiman
  - 123. Bank Khusus Perumahan
  - 124. Tabungan Perumahan Nasional
  - 125. Prasarana Usaha

- N. PARIWISATA**
  - 126. Promosi Pariwisata
- O. LINGKUNGAN**
  - 127. Sustainable Consumption and Production (SCP)
  - 128. Bisnis Lingkungan
  - 129. Promosi One Desa One Product (ODOP)
  - 130. Corporate Social Responsibilities
- P. MONETER DAN FISKAL**
  - 131. Insentif dan Mitigasi Risiko Sektor Keuangan
  - 132. Stabilitas Sistem Keuangan
  - 133. Public Governance Sektor Keuangan
  - 134. Pengembangan Fungsi Intermediasi Perbankan
  - 135. Pasar Modal sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif
  - 136. Pembentukan Institute of Capital Market
  - 137. Penjaminan Surat-surat Berharga
- Q. KETENAGAKERJAAN**
  - 138. Tindak-lanjut Pembentukan Forum Bipartit Nasional
  - 139. RPP Kompensasi PHK/Pesangon
  - 140. International Labour Conference 97
  - 141. Sosialisasi Isu-Isu Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
  - 142. Tindak-lanjut MoU Program Siap Kerja Depdiknas-Kadin-Depnakertrans
  - 143. Tindaklanjuti MOU Perluasan Kesempatan Kerja Kadin Indonesia-BNP2TKI
  - 144. Melanjutkan Pembentukan BKSP di 14 Provinsi
  - 145. Melanjutkan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
  - 146. Mengadakan Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Pelatihan
  - 147. Kompetensi SDM Industri SPA
  - 148. Pengembangan Pemuda Wirausahawan
  - 149. Pemanfaatan Tenaga PHK Terampil
  - 150. Mewujudkan SKB Kadin Indonesia dengan Direktorat Jenderal PLS Depdiknas
- R. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**
  - 151. Visi
  - 152. Misi
  - 153. Kebijakan Proyek Skala UMKM
  - 154. Kebijakan Pengembangan Sektor Riil melalui Bisnis Real Time
  - 155. Revitalisasi Koperasi
  - 156. Pembiayaan yang lebih Kondusif untuk UKM
  - 157. Sumber Modal Alternatif
  - 158. Desain Model Pusat Informasi Komoditi
  - 159. Database Industri Basis Pengembangan Pasar
  - 160. Desain UKM Estate
  - 161. Pengembangan OVOP
  - 162. Diseminasi Informasi dan Penyuluhan Manajemen
  - 163. Modeling Jaringan Produsen dan Pasar
  - 164. Pemanfaatan Situs-Situs Internet untuk Perluasan Jaringan Usaha
  - 165. Penggunaan Software Legal oleh UKM
- S. KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL**
  - 166. Kerjasama Kawasan Regional
  - 167. Pemantapan dan Peningkatan Fungsi
  - 168. Perbaikan Hubungan Kerja
  - 169. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
  - 170. Pemantapan Hubungan Kerja Dengan Kabinet
  - 171. Advokasi dan Dukungan Perundingan Internasional

- 172. Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Birokrasi
- 173. Hubungan Dengan Lembaga Bilateral
- 174. Hubungan Dengan Lembaga Multilateral
- 175. Misi Dagang
- 176. Afrika Bagian Selatan
- 177. Bangladesh
- 178. Jepang
- 179. Malaysia
- 180. Rusia dan Commonwealth of Independent States (CIS)
- 181. Timur Tengah dan OKI

**T. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ETIKA BISNIS**

- 182. Pengembangan CSR
- 183. Training for Trainers (ToT) GCG
- 184. Penelitian Kebijakan GCG
- 185. Pelatihan, Forum Diskusi dan Sosialisasi GCG
- 186. Advokasi Kebijakan GCG
- 187. Buku Panduan , Modul dan Kisah Sukses Implementasi GCG
- 188. Survey Penerapan *Code of Conduct* pada Asosiasi Usaha di Indonesia
- 189. Seminar Etika Bisnis (kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta)
- 190. Sosialisasi Penerapan Etika Bisnis
- 191. Reward & Punishment
- 192. Seminar Persaingan Usaha yang Sehat bagi Pelaku Bisnis.
- 193. Sosialisasi Persaingan Usaha yang Sehat bagi Pelaku Bisnis Melalui Penerbitan Buku/Leaflet.
- 194. Perumusan Kebijakan Persaingan Usaha yang Sehat
- 195. Pengembangan Pranata Usaha
- 196. Advokasi Kepranataan Usaha
- 197. Capacity Building Layanan Hukum
- 198. Penciptaan Forum Network

**U. PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

- 199. Road-Map Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia 2015
- 200. Temu Usaha Kelapa Sawit Indonesia

**IV PERKUATAN ORGANISASI**

- 201. Website Kadin
- 202. Workshop Direktur Eksekutif
- 203. Program Rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia
- 204. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi
- 205. Peningkatan Anggota
- 206. Pelaksanaan sistim layanan C/O secara nasional
- 207. Buku Direktori Organisasi dan Layanan Kadin Indonesia
- 208. Database Perusahaan Anggota Kadin
- 209. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 1/1987
- 210. Training Kewirausahaan bekerjasama dengan Asosiasi/Himpunan
- 211. Keorganisasian

# I PENDAHULUAN

## A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2007

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2008 adalah Rapim terakhir bagi Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2004-2009; karena itu Rapim ini menempati posisi strategis untuk mempersiapkan penyusunan garis-garis besar kebijakan organisasi dalam periode lima tahunan 2009-2014. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Kadin Indonesia mencatat kondisi perekonomian sampai akhir 2007.

### 01. Ekonomi Makro per 2007 Stabil

Dalam tahun 2007 ekonomi makro cukup stabil dan cenderung membaik; nilai tukar Rupiah relatif tidak bergejolak, suku bunga cenderung menurun, dan tingkat inflasi lebih rendah dari tahun 2006. Cadangan devisa meningkat cukup signifikan : posisi per 30 November 2007 mencapai US\$54,9 miliar, meningkat tajam dibandingkan posisi akhir tahun 2006 sebesar US\$34,7 miliar.

### 02. Pertumbuhan PDB

Pertumbuhan ekonomi mendekati target APBN 2007. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) selama enam triwulan berturut-turut menunjukkan peningkatan terus menerus. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 6,2 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) sebesar 5,9 persen.

### 03. Kepercayaan Investor Institusional Asing

Pasar modal mencatat rekor-rekor baru: IHSG (indeks harga saham gabungan) dan SUN (Surat Utang Negara) terus diminati oleh investor domestik maupun asing, ORI (Obligasi Republik Indonesia) terus diserap investor perseorangan dengan nilai melebihi target. Dari komposisi SUN yang dipegang investor asing, terlihat bahwa yang jatuh tempo di atas 10 tahun menduduki porsi terbesar. Ini menandakan bahwa di mata investor institusional asing, prospekekonomi Indonesia dalam jangka panjang cukup menjanjikan.

### 04. Kredit Meningkat, tapi *Undisbursed Loans* Tinggi

Sejak semester kedua 2007 ekspansi kredit perbankan meningkat relatif tajam, dan lebih tinggi ketimbang peningkatan dana pihak ketiga. Sehingga, LDR (*loan-to-deposit ratio*) juga naik mendekati 70 persen, dengan catatan bahwa jumlah kredit yang belum dicairkan (*undisbursed loans*) masih tetap tinggi.

### 05. Tangguh jika Konsisten

Dari gambaran di atas, bisa disimpulkan bahwa secara umum dan agregat, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2007 menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Seandainya *signals* yang menghadirkan lebih konsisten, niscaya perkembangan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dan sekaligus lebih tangguh dalam menghadapi guncangan eksternal dan menjawab persoalan-persoalan sosial di dalam negeri.

### 06. Gejala Deindustrialisasi

Dilihat dari perkembangan lima tahun terakhir, disimpulkan bahwa ada faktor struktural yang membuat pola pertumbuhan sektoral semakin kontras: *tradable versus non-tradable*. Peranan sektor industri manufaktur sebetulnya masih bisa dipacu hingga mencapai sekitar 35 persen dari PDB. Setelah itu, baru lambat laun mulai berkurang.

Jika peranan sektor industri manufaktur masih di bawah 30 persen tapi sudah mandeg, bahkan turun walau sangat tipis, berarti ada tanda-tanda kita mengalami "deindustrialisasi" dini. Ini menandakan kualitas pertumbuhan sektoral tidak optimal, sehingga sulit diharapkan memberikan sumbangan berarti bagi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta perbaikan ketimpangan.

#### **07. Pola pertumbuhan berdasarkan Penggunaan**

Kualitas pertumbuhan juga terancam jika ditopang oleh komponen-komponen penggunaan (*expenditure*) yang kurang menjamin kesinambungan pertumbuhan. Selama 5 tahun terakhir, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi privat (*private consumption*): trend penyaluran kredit perbankan menampakkan pertumbuhan kredit konsumsi jauh melebihi kredit investasi selama periode 2003-05, lalu merosot dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2008. Diduga bahwa peningkatan laju pertumbuhan konsumsi privat makin ditopang oleh kredit. Hal ini tentu saja tidak akan bisa bertahan lama, sehingga diperkirakan pada tahun 2008 sumbangsih konsumsi privat dalam pertumbuhan ekonomi akan melemah.

Peranan ekspor cukup besar, namun sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan laju perdagangan dunia, pertumbuhan ekspor mulai melamban pada triwulan III 2007. Kecenderungan tersebut tampaknya akan berlanjut pada tahun mendatang. Pada waktu yang bersamaan pertumbuhan impor justru diperkirakan lebih tinggi. Sehingga, ekspor neto cenderung akan menyusut.

Agar bisa mengimbangi kecenderungan menurunnya sumbangan konsumsi privat dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor), mau tak mau pilihan harus diarahkan pada investasi yang diukur berdasarkan data pembentukan modal tetap (*fixed capital formation*). Sejauh ini pertumbuhan investasi masih sangat labil. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004, yakni 15,7 persen, lalu melorot hanya 2,9 persen pada tahun 2007.

Dalam empat triwulan terakhir, pertumbuhan investasi berfluktuasi sekitar 6,9 hingga 8,8 persen, di bawah target pemerintah sebesar 12 persen. Sekitar 76 persen dari pembentukan modal tetap adalah dalam bentuk konstruksi (bangunan), sedangkan yang dalam bentuk mesin dan alat transport masing-masing hanya 6,4 persen untuk domestik dan 17,2 persen untuk luar negeri (impor).

Agar investasi memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi penyerapan tenaga kerja, maka porsi mesin harus lebih didorong. Pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk konsumsi dan investasi, tampaknya kurang bisa diharapkan, mengingat pada tahun 2007 dan 2008 APBN harus menanggung beban subsidi yang sangat berat akibat tingginya harga minyak dan kemerosotan produksi minyak di dalam negeri dan beban pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri. Ditambah lagi dengan kendala birokrasi yang membuat masih tersendatnya realisasi anggaran investasi pemerintah.

#### **08. Daya Beli (*Purchasing Power*)**

Naiknya harga-harga komoditas primer di pasar dunia yang disertai dengan relatif lambatnya laju pertumbuhan sektor industri manufaktur telah membuat terjadinya ketimpangan peningkatan daya beli antara Jawa dan luar Jawa. Secara nasional Nilai Tukar Petani (NTP) memang mengalami kenaikan sebesar 2.52% yoy dalam bulan September 2007 (walaupun hanya naik sebesar 0.09% selama sembilan bulan di tahun 2007). Namun ternyata NTP (tahun dasar 1993) yang tertinggi kebanyakan berada di propinsi luar Jawa. Lima besar propinsi dengan NTP tertinggi adalah Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Bali.

#### **09. Ketimpangan Jawa - Luar Jawa**

Pola ketimpangan Jawa - luar Jawa juga terlihat dari turunnya dan relatif rendahnya upah riil buruh tani di Jawa, padahal sebagian terbesar tenaga kerja di sektor

pertanian (sekitar 43% dari total orang yang bekerja secara nasional) berada di sektor pertanian di Jawa. *Quo vadis* program revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan oleh pemerintah? Program proteksi harga komoditas pertanian pangan yang dilakukan pemerintah tak tampak memberikan manfaat bagi petani, melainkan meningkatkan margin perdagangan saja. Data BPS menunjukkan upah nominal buruh tani di Jawa sebesar Rp. 13.373,- per hari, sementara upah nominal buruh tani di luar Jawa sebesar Rp. 18.771,- per hari. Upah riil buruh tani di Jawa mengalami penurunan sebesar 2.07%yoy, sementara upah riil buruh tani luar Jawa naik 0.82%yoy pada bulan September 2007.

Sementara itu, nilai upah riil (yang mencerminkan daya beli) buruh informal di perkotaan (terutama sekali di Jawa) mengalami penurunan di tahun 2007 (data sampai bulan November), sebesar 0.81%yoy untuk buruh bangunan, sebesar 3.78%yoy untuk buruh potong rambut wanita, dan sebesar 0.91 %yoy untuk pembantu rumah tangga. Walaupun secara umum upah riil buruh di sektor industri (formal) mengalami kenaikan (sebesar 4.0%yoy dalam 2Q07), data BPS juga menunjukkan terjadinya penurunan upah riil buruh industri rokok (sebesar 7.96%yoy), industri pakaian jadi (sebesar 4.20%yoy), dan industri batu bata/ubin (sebesar 9.54%yoy).

## 10. Kebijakan Fiskal

Relatif lebih rendahnya defisit anggaran untuk tahun 2007, yang diperkirakan akan hanya mencapai 1.3% dari PDB versus target ABPN-P sebesar 1.5% dari PDB, tampak baik dari segi *sovereign risk*; apalagi jika kita masukkan resiko kenaikan harga minyak dunia. Namun "keberhasilan" menekan defisit anggaran tidaklah menjadi ukuran kinerja kebijakan fiskal yang baik, karena bersamaan dengan itu Indonesia kehilangan kesempatan untuk tumbuh dengan lebih cepat dan penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak.

Kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah menjadi terganggu akibat ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran modal (*capital spending*) yang sangat dibutuhkan untuk mendukung perekonomian. Realisasi belanja modal pemerintah yang kurang dari 60% dari yang dianggarkan, bukanlah suatu prestasi yang dapat dibanggakan. Perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan anggaran (yang juga melibatkan departemen lain dan pemerintah daerah) harus segera dilakukan kalau kita tidak ingin kehilangan kesempatan emas momentum untuk tumbuh dengan lebih baik.

## 11. SBI

Biaya operasi moneter yang besar yang harus ditanggung oleh Bank Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian. Tercatat setiap tahunnya dibutuhkan dana sekitar lebih dari Rp. 22 triliun untuk membayar bunga SBI dan FasBI; apalagi dengan kecenderungan jumlah Operasi Pasar Terbuka (SBI dan FasBI) yang makin meningkat menjadi sekitar Rp. 300 triliun. Besarnya jumlah bunga SBI dan FasBI ini juga akan menimbulkan semakin banyaknya likuiditas di pasar, dan kalau tidak segera dibenahi akan dapat membawa kita ke arah perangkap likuiditas (*liquidity trap*) dimana kebijakan moneter akan menjadi tidak efektif lagi.

## 12. Logistik

Sektor logistik merupakan urat nadi bagi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Tanpa kelancaran bekerjanya sektor logistik, proses produksi pun dapat terganggu. Inflasi pun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketertinggalan di jalan raya dan di pelabuhan. Faktor lokasi dan ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, apalagi menjelang di lakukannya upaya menuju terbentuknya ASEAN *economic community*, di mana sektor logistik menjadi salah satu sektor yang pertama yang akan diintegrasikan. Permasalahan di sektor logistik bukan hanya menyangkut pengurangan ongkos angkut. Perkembangan logistik yang baik harus selalu dikaitkan dalam mata rantai suplai dan arus barang/jasa. Ketentuan

hukum yang jelas pun dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan usaha logistik. Perlu dipertegas kewenangan instansi untuk menangani sektor logistik yang penting ini, karena selama ini telah terjadi perebutan kewenangan antara departemen perdagangan, departemen perhubungan dan kementerian komunikasi dan informasi.

### **13. Lingkungan Global**

Krisis sektor keuangan (*sub-prime mortgage*) di Amerika Serikat (AS) akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan di beberapa negara di Asia. Perlambatan laju pertumbuhan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia ini kemungkinan akan sedikit mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 melalui sedikit perlambatan dalam laju pertumbuhan ekspor Indonesia. *Trend* pelemahan nilai dollar AS yang sudah terjadi selama ini, mungkin akan terus berlangsung, sejalan dengan akan makin melebarnya gap suku bunga di AS dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, anehnya, hal itu tidak terjadi dengan nilai nominal mata uang Indonesia (Rupiah), yang diperkirakan akan masih sedikit tertekan di kisaran Rp 9.250 - 9.400 per dollar AS di tahun 2008. Nilai riil Rupiah memang akan tetap menguat, yang berarti akan terjadi penurunan daya saing dari produk-produk Indonesia di pasar dunia, terutama sekali untuk produk-produk hasil industri manufaktur nonmigas.

Pelemahan nilai nominal Rupiah tampaknya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor domestik, seperti naiknya kebutuhan impor barang dan jasa sejalan dengan kecenderungan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di tahun 2008, serta bertambah besarnya permintaan atas dollar AS oleh Pertamina membiayai impor minyak mentah dan BBM, sementara penambahan suplai dollar dari ekspor migas tidak masuk ke pasar valuta asing, melainkan langsung menambah cadangan devisa BI.

Tampaknya penghematan penggunaan BBM dan peningkatan produksi BBM dalam negeri merupakan suatu keharusan supaya Indonesia tidak lagi selalu tertekan oleh tingginya harga minyak dunia. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat proses produksi migas yang juga disertai dengan usaha penghematan dan penurunan konsumsi migas, termasuk pengalihan ke sumber energi yang dapat terbarukan (*renewable*) tampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Salah satu risiko yang masih tetap menghantui perekonomian Indonesia, walaupun selama ini dampaknya masih relatif terbatas di sektor keuangan saja, adalah bila terjadi pembalikan arus modal masuk portofolio secara deras, baik karena para investor asing itu menjadi lebih *risk averse* atau karena terjadinya *yendaka* (penguatan nilai Yen Jepang secara cepat) yang memicu terjadi pembalikan arah Yen *carry trade*, atau juga karena faktor-faktor domestik yang dianggap sudah tidak lagi mendukung perolehan imbal hasil yang tinggi bagi investor asing tersebut. Kebutuhan pembiayaan APBN yang cukup besar dalam bentuk obligasi pemerintah di tahun 2008, jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menaikkan tingkat risiko pembalikan arus modal masuk ini. Pengembangan pasar-pasar khusus untuk surat berharga negara (SBN), seperti obligasi ritel, peningkatan peran daerah surplus dalam membeli SBN, serta pengembangan surat berharga syariah menjadi suatu keharusan.

## **B. PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL 2008**

### **B.1. Prospek Jangka Pendek 2008**

#### **14. Peringkat Risiko Investasi**

Indonesia sebetulnya sudah mulai kembali muncul di dalam radar FDI (foreign direct investment). Berdasarkan kajian EIU (Economist Intelligence Unit, 2007), untuk periode 2007-2011, posisi Indonesia berada pada urutan 36 dalam daftar penerima FDI. Pada periode tersebut, FDI yang masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar US\$6,6 miliar rata-rata setahun. Daya tarik Indonesia memang belum seperti di era 1980-an.

Kemunculan Indonesia dalam radar FDI sejalan dengan perbaikan skor lingkungan bisnis (*business environment score*) dari 5,39 pada periode 2002-06 menjadi 6,2 pada periode 2007-11. Namun demikian peringkat Indonesia turun satu tingkat, dari ke-60 pada periode 2002-06 menjadi ke-61 pada periode 2007-11, karena ternyata perbaikan lingkungan bisnis di negara-negara lain pada umumnya lebih cepat daripada Indonesia.

Perbaikan terlihat dari *rating* dalam risiko berbisnis (*the risk of doing business*) yang mencapai bernilai C - yang merupakan batas kelulusan - sehingga sudah barang tentu FDI yang masuk pun tidak bisa diharapkan yang berkualitas tinggi. *Good is not good enough*. Kita harus memacu diri untuk berbenah lebih seksama. Cara pandang dan penanganan tak bisa lagi *linear*. Di dunia yang bercirikan dinamika *non-linear*, kita dituntut untuk menggunakan strategi dan pendekatan yang juga bersifat *non-linear*.

Tanpa perubahan cara pandang dan pendekatan baru, maka gerak maju perekonomian Indonesia dalam jangka pendek ke depan tak bisa menjanjikan perbaikan spektakuler. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia 2008 diperkirakan hanya tumbuh sedikit lebih tinggi dari tahun 2007, namun hampir tertutup kemungkinan bisa mencapai target APBN 2008 sebesar 6,8 persen. Pertumbuhan maksimum diperkirakan hanya sekitar 6,5 persen.

## 15. Kendala di Sisi Suplai

Hal ini juga disebabkan oleh kendala di sisi supply (*supply constraints*) yang sudah barang tentu tak bisa diatasi dalam jangka pendek.

Keterbatasan infrastruktur akan menjadi kendala yang kian dirasakan. Volume dan kualitas pasokan listrik praktis tak akan bertambah, sementara tarif listrik untuk industri akan terus dinaikkan. Sama halnya dengan kapasitas pelabuhan dan jalan yang juga tak akan beranjak dari kondisi sekarang. Sementara itu, peluang pemompaan dana APBN akan terkendala oleh rendahnya efektivitas pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah.

Kendala infrastruktur semakin terasa di luar Jawa, sehingga potensi keuntungan dari membungahnya harga-harga komoditas perkebunan dan pertambangan tak sepenuhnya bisa terwujud secara optimal. Padahal, *booming* komoditas perkebunan dan pertambangan bisa menjadi pengimbang dan sekaligus pengompensasi dari berakhirnya era kejayaan migas.

Selain itu, tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun nonpajak bisa disalurkan untuk membantu sektor-sektor maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertekan akibat kenaikan tajam harga minyak. Tidak sepatutnya *windfall profit* dari komoditas digunakan untuk menambal subsidi BBM yang terus menggelembung, karena sama saja artinya kita menoleransikan pemborosan energi yang kian langka.

## 16. Pertumbuhan Sektor *Tradable* dan *Non-tradable*

Menyadari bahwa belakangan ini telah terjadi perubahan dinamika di dalam perekonomian Indonesia, analisis tentang prospek ekonomi agaknya harus pula memasukkan dimensi *spatial*. Pola pertumbuhan yang kontras antara sektor *tradable* dan *non-tradable* cenderung menekan kehidupan di Jawa untuk penduduk berpendapatan rendah, karena sebagian besar industri manufaktur berlokasi di Jawa. Pertumbuhan subsektor pertanian pangan yang masih tertekan dan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian di Jawa turut memperberat tekanan. Sebaliknya, penduduk berpendapatan tinggi yang hidup dari jasa-jasa modern — yang mayoritas berada di kota-kota besar di Jawa — menikmati pertumbuhan yang relatif sangat tinggi. Kecenderungan inilah yang menyebabkan indeks kesenjangan (*gini coefficient*) memburuk, bahkan naik tajam pada tahun 2007. Penyumbang terbesar dari kesenjangan ini adalah Jawa.

Sementara itu, penduduk di daerah luar Jawa, khususnya Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, pada umumnya menikmati kehidupan yang lebih baik. Hampir seluruh

komoditas yang harganya belakangan ini melonjak dihasilkan di luar Jawa. "Keberuntungan" luar Jawa bertambah karena tak banyak terkena imbas perlambatan laju pertumbuhan industri manufaktur yang memang terkonsentrasi di Jawa. Sayangnya potensi luar Jawa kurang bisa dioptimalkan karena terkendala oleh keterbatasan infrastruktur.

## **B.2 Tantangan hingga Jangka Menengah**

Permasalahan strategik untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dalam Jangka pendek/menengah meliputi:

### **17. Struktur Insentif Tidak Tepat**

Struktur insentif yang tidak tepat (*wrong incentive structure*) menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi lebih berat ke sektor-sektor jasa (*non-tradable*) seperti telekomunikasi, properti, dan jasa-jasa lainnya. Sementara sektor-sektor perdagangan (*tradable*) yang seharusnya menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan (pertanian dan industri manufaktur) agak terbengkalai. Hal ini terlihat jelas dalam pertumbuhan sektoral PDB (Produk Domestik Bruto), di mana sektor pertanian hanya bertumbuh sebesar 2% - 3% dan sektor industri manufaktur hanya tumbuh sebesar 4% - 5% saja. Kecenderungan ini juga terlihat dari relatif rendahnya laju pertumbuhan kredit perbankan ke sektor pertanian dan industri manufaktur yang masih satu digit (*single digit*). Harga saham di Bursa Efek Jakarta juga mencerminkan sistem insentif yang kurang sesuai ini, yang mana saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur dan juga pertanian (non-perkebunan) praktis tidak terlalu meningkat secepat peningkatan harga saham sektor pertambangan, properti, dan telekomunikasi. Dalam hal ini diperlukan peran kebijakan pemerintah untuk benar-benar mendorong sektor pertanian dan industri manufaktur, guna mengimbangi perkembangan yang signifikan di sektor-sektor *non-tradable* tersebut yang di antaranya disebabkan oleh peningkatan harga komoditi dunia.

Dengan kata lain, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif bagi sektor pertanian (Apa kabarnya revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Pemerintah?), industri manufaktur yang padat karya, dan sektor energi.

### **18. Gejala Pengangguran (*Jobless Growth*)**

Gejala ini sebagian merupakan dampak globalisasi di mana industri padat karya pindah ke negara-negara lain yang lebih menjanjikan dan kegagalan kita untuk menaiki jenjang kemajuan teknologi. Keadaan sangat mendesak untuk menciptakan lapangan kerja. Bilamana hal ini gagal dilakukan maka risiko konflik sosial, baik di desa maupun di kota akan meningkat dengan tajam.

### **19. Ketidak-terkaitan antara Sektor Finansial dan Sektor Riil**

Ada semacam ketidak-terkaitan (*disconnect* atau *decoupling*) antara sektor finansial dan sektor riil, suatu hal yang akan mengganggu kelanjutan pertumbuhan ekonomi. Selama ini kelebihan dana di sektor keuangan diserap dalam SBI yang juga memakan biaya yang tidak sedikit bagi bank sentral (lebih dari Rp 20 triliun per tahun). Perbankan mengalami masalah dalam melakukan pinjaman. Bahkan, karena prospek usaha domestik yang tidak menjanjikan para pengusaha enggan untuk mencairkan pinjaman yang telah disetujui perbankan (dewasa ini, kredit yang tidak digunakan telah mencapai lebih dari Rp 150 triliun).

### **20. Dualisme Ekonomi**

Terdapat kecenderungan meluasnya *dualisme ekonomi*. Pertumbuhan cenderung terpusat pada sektor-sektor kegiatan ekspor (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, perkebunan dan pertambangan) dan investasi baru berada di lokasi yang

ideal dengan kegiatan ekspor (di Batam misalnya). Sektor-sektor lain, yang pada umumnya berorientasi konsumsi domestik dan menyerap tenaga kerja yang tinggi, laju pertumbuhannya rendah seperti sektor pertanian pangan dan UKM.

#### **21. Hambatan Implementasi Regulasi**

Implementasi regulasi di bidang *planning, programming and budgeting* yang menghambat proses pembangunan karena proses anggaran sering tidak terkait dengan kebijakan pokok, terlalu rumit, tidak fleksibel dan tidak dapat mengakomodasi program dan proyek yang multi-year. Akibatnya, *back-loading* kegiatan menjadi semakin parah, dan penyelesaian proyek multi-year berjalan lambat.

#### **22. Buruknya kualitas kebijakan**

Kebijakan cenderung ad hoc karena payung kebijakan menyeluruh tidak dipersiapkan, mengakibatkan kredibilitas pemerintah yang rendah dan tidak meningkatkan iklim bisnis dan investasi. Contoh terakhir adalah respons terhadap kenaikan harga minyak bumi. Tidak adanya kebijakan energi yang komprehensif dan *robust* telah mengakibatkan pembahasan menjadi tidak konseptual, teknis dan berdimensi jangka pendek.

#### **23. Buruknya kerangka implementasi kebijakan lintas sektoral.**

Hal ini terutama berkaitan dengan wewenang yang tidak jelas dan anggaran lintas sektoral yang tidak ada/terbatas bagi *lead organizations* yang diberi tugas.

### **B.3. Daya Saing Jangka Panjang**

Untuk memelihara dan meningkatkan daya saing dalam Jangka panjang, sekarang ini kita hendaknya menyusun:

#### **24. Kebijakan dan Implementasi lintas sektor**

Kebijakan strategik dan kerangka implementasi lintas sektor yang robust. Setidaknya untuk beberapa masalah yang penting seperti kebijakan energi, perluasan kesempatan kerja, sunset and sunrise industries, integrasi teknologi, perencanaan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan untuk industri-industri tertentu.

#### **25. Reformasi Administrasi Negara**

Pemerintah perlu membuat agenda besartentang reformasi administrasi negara. Reformasi ini hendaknya lebih dari sekedar kenaikan gaji dan perubahan job description. Reformasi proses kebijakan merupakan komponen yang sangat penting bagi negara modern yang senantiasa berhadapan dengan berbagai masalah lintas sektor, masalah complex emergencies, masalah tak terduga yang timbul dari proses globalises! dan regionalisasi. Satu sama lain, hal-hal ini menuntut respons yang cepat dan memadai dari CEO pemerintah. Dalam pada itu, kemampuan kantor Kepresidenan dalam bidang kebijakan strategik sangat terbatas.

### **B.4. Visi Industri Indonesia dan Rapimnas Kadin**

Tentu saja pengelolaan dan pembangunan perekonomian tidak bisa berdasarkan pada suatu kondisi jangka pendek. Tetap diperlukan acuan perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan jangka menengah dan pendek. Dalam kaitan dengan perencanaan jangka panjang, pada tahun 2004 telah berkembang wacana mengenai Visi Industri Indonesia 2030 dan untuk jangka menengah perlu ada suatu peta-jalan pembangunan industri yang disebut roadmap industri 2010.

Tahun 2008 adalah tahun keempat perencanaan jangka menengah tersebut. Ini merupakan momentum yang tepat (*decisive momentum*) untuk melakukan tinjauan atau review terhadap roadmap 2010 maupun terhadap Visi 2030. Berdasarkan momentum itulah Rapat

Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2008 diselenggarakan dengan tema "**Optimalisasi Reran Dunia Usaha dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Ketersediaan Energi dan Ketahanan Pangan**"

Topik-topik pembahasan dalam persidangan Rapimnas Kadin 2007 difokuskan pada tema tersebut.

## II

# KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS

### A. UMUM

Gejolak perekonomian global dewasa ini yang berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi hampir di setiap negara, seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai suatu momentum untuk segera melakukan perubahan ke dalam dengan meneguhkan tekad guna lebih memperkokoh landasan perekonomian nasional. Dalam kaitan ini, Indonesia harus dapat lebih baik mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber kekuatan dan keunggulan yang dimiliki. Hal ini perlu segera dilakukan, karena tanpa kesungguhan untuk melakukan pengelolaan potensi ekonomi secara lebih baik, diperkirakan dalam waktu dekat, ekonomi Indonesia akan turut melesu dan mengalami kesulitan serta berpotensi terjadinya krisis. Dalam kaitan ini, terutama pemerintah dan DPR jangan terlalu menghabiskan waktu hanya untuk melakukan revisi APBN-P dan merubah target pertumbuhan ekonomi. Lebih baik mengarahkan gerak perekonomian agar tetap dapat tumbuh walau melambat, namun mampu menjawab persoalan-persoalan besar yang dihadapi bangsa ini, yakni pengangguran dan kemiskinan.

Tingkat pengangguran dewasa ini masih relatif jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Sekalipun dalam dua tahun terakhir angka pengangguran telah berangsur turun kembali menjadi satu digit, namun jika dicermati lebih mendalam, perbaikan ini belum diiringi dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal, yang mencapai hampir 70 persen dari keseluruhan jumlah orang yang bekerja, memberi gambaran bahwa kualitas ketenagakerjaan kita belum membaik. Betapa tidak, hampir dua pertiga dari keseluruhan pekerja tidak memiliki jaring-jaring pengaman sosial, lokasi usaha yang tidak tetap, dan tak tersentuh oleh perbankan dan kebijakan-kebijakan formal pemerintah.

Hal lain yang sangat perlu diwaspadai adalah inflasi. Laju inflasi dalam dua tahun terakhir memang sudah kembali satu digit, namun jika dibandingkan dengan rata-rata negara tetangga dan negara berkembang lainnya, laju inflasi Indonesia jauh lebih tinggi. Kenaikan harga pangan telah dan akan berimbas pada kenaikan laju inflasi di dalam negeri. Untuk ini diperlukan strategi yang tepat sasaran agar laju inflasi dapat ditekan serendah mungkin. Dalam kaitan ini, terutama pemerintah, seyogyanya dapat mengandalikan penuh terjadinya kelangkaan berbagai komoditas khususnya yang terkait dengan pangan, infrastruktur dan energi. Kelangkaan komoditas dimaksud sesungguhnya dapat dipasok oleh negara atau BUMN, sehingga bisa memberikan sumbangsih cukup berarti untuk meredam laju inflasi. Berkenaan dengan hal itu, hendaknya berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dapat lebih diselaraskan, agar tidak terjadi ketimpangan. Sebagai suatu contoh pengenaan tarif listrik dan gas elpiji untuk industri yang jauh lebih tinggi ketimbang tarif untuk rumah tangga. Padahal, *cost* untuk industri nyata-nyata lebih rendah karena volume pembeliannya jauh lebih besar. Penerapan kebijakan harga yang kurang selaras ini pada gilirannya menimbulkan praktik menyimpang sehingga menimbulkan kelangkaan yang lebih parah dan kenaikan harga yang lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan harga resmi yang dilakukan bertahap.

Mengingat berbagai kondisi dan keterbatasan, sehingga suatu kebijakan tidak dapat diandalkan bagi pencapaian multi target, maka sepatutnya pemerintah menitikberatkan pada beberapa tujuan utama dengan beberapa instrumen terpilih, namun mempunyai probabilitas keberhasilan yang tinggi serta berdampak luas bagi mayoritas penduduk.

Kadin Indonesia berpandangan bahwa penitikberatan pada kualitas pertumbuhan dan pengendalian inflasi serta pengejawantahan dari slogan "*pro growth-pro poor-pro job*" bisa dimulai dari yang bersifat paling mendasar dan bersandarkan dari apa yang sudah kita miliki sebagai modal dasar. Bertolak dari pandangan ini, maka Kadin Indonesia mengedepankan tiga bidang yang paling membutuhkan pembenahan mendasar, yakni: pangan, energi, dan infrastruktur. Pembenahan di ketiga bidang ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi penguatan landasan pertumbuhan berkelanjutan, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan pada gilirannya mengurangi jumlah penduduk miskin secara

berarti.

Terkait dengan fungsi dan tugas selaku wadah organisasi dunia usaha dan mitra pemerintah dalam pembangunan nasional, Kadin memiliki peran yang sangat besar bagi suksesnya proses pembangunan dimaksud, terutama pembangunan di sektor yang terkait dengan perekonomian. Dalam hal ini Kadin dituntut proaktif berperan serta menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan yang berkembang sesuai dengan porsinya. Untuk ini, upaya perbaikan dan pengembangan organisasi perlu terus dilakukan dan makin menjadi tuntutan, guna menjadikan organisasi Kadin semakin kuat dan profesional. Dengan demikian, Kadin diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan anggota dalam menghadapi tantangan masa depan dan memberikan respon secara efektif terhadap berbagai persoalan yang timbul.

Kedekatan Kadin Indonesia dengan pemerintah pusat menunjukkan semakin diakuinya peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga kemitraan ini perlu diperluas sampai ke daerah hingga ke strata yang lebih rendah. Dengan demikian aspirasi dunia usaha dapat terakomodasi secara baik di semua tingkatan agar perekonomian daerah lebih maju.

## **B. PERUBAHAN MENDASAR PERKEMBANGAN PANGAN**

Era harga pangan murah sudah berlalu. Sejak tahun 2005 harga pangan berbasis biji-bijian mulai menunjukkan trend peningkatan. Kenaikan harga minyak dunia hingga mendekati US\$ 110 per barrel semakin melonjakkan harga-harga komoditi pangan secara dramatis. Harga komoditas pangan strategis seperti gandum, beras, daging, dan susu, meningkat terutama karena fenomena penurunan produksi di beberapa negara penghasil pangan. Akibatnya, volume perdagangan menjadi tipis karena permintaan pangan yang terus meningkat.

Kenaikan harga minyak dunia secara jelas ikut meningkatkan biaya produksi, transportasi dan distribusi, dan menjadi pemicu inflasi di beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. Disamping itu, sebagian besar negara yang memiliki sumber daya alam agak berlimpah, saat ini sedang mengembangkan bahan bakar biologi (*biofuels*), yang juga telah mendorong permintaan terhadap minyak nabati dunia. Akibatnya, harga komoditas minyak dan lemak yang dapat digunakan untuk energi meningkat tajam. Harga minyak sawit mentah (CPO), jagung, kedelai, tebu, rapeseed, dan lain-lain, yang selama ini digunakan sebagai sumber pangan dan minyak nabati dunia, meningkat sangat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Fenomena ini merupakan kecenderungan jangka panjang yang bisa mengarah pada Era Perang Pangan (*Food Wars*). Dalam konteks ini strategi kebijakan pangan yang hanya mengarah pada peningkatan produksi pangan saja (*production approach*), tidak akan cukup bertahan dalam kondisi global yang semakin keras. Elemen lain yang menjadi bibit-bibit perang pangan adalah: krisis lingkungan atau pemanasan global, visi atau ideologi pangan, pola makan (diet), kesehatan atau keamanan pangan, dan pencegahan penyakit.

Hal yang juga perlu diwaspadai adalah bahwa para pelaku ekonomi dan pemimpin politik negara-negara produsen pangan cenderung menahan stok untuk kebutuhan domestiknya dan tidak secara gegabah melempar ke pasar global. Amerika Serikat sedang menahan stok jagung karena permintaan untuk etanol juga besar. Hal yang sama terjadi pada kedelai. Permintaan yang besar terhadap kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel juga membuat pemilik stok minyak kedelai bertahan untuk tidak segera melempar stoknya ke pasar. Kesemua ini menjadikan harga pangan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia.

## **C. SEKTOR ENERGI**

Energi sangat penting peranannya dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai bahan bakar untuk proses industrialisasi, bahan baku untuk proses produksi, maupun sebagai komoditas ekspor. Sumber energi yang digunakan untuk keperluan domestik dewasa ini meliputi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batu bara) serta energi terbarukan (tenaga air dan tenaga panas bumi). Seiring dengan intensitas penggunaannya, cadangan energi fosil akan terus berkurang, meskipun cadangan batu bara dan gas bumi masih cukup

melimpah dan tersedia untuk jangka waktu yang relatif panjang. Namun, dengan tingkat produksi seperti saat ini dan bila tidak ditemukan cadangan baru, cadangan minyak bumi akan habis dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Pada pertengahan dekade sembilan puluhan Indonesia mulai merasakan keterbatasan sumber daya energi, terutama minyak bumi. Kebijakan penggunaan energi yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sampai saat ini belum terarah dengan jelas, bahkan mungkin tidak berlebihan menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan energi nasional. Dengan berkurangnya cadangan minyak bumi, tersedianya sumber energi yang dapat dimanfaatkan, serta munculnya kesadaran baru untuk memperbaiki kualitas hidup (masalah lingkungan), maka mau tidak mau Indonesia memerlukan kebijakan energi yang berlandaskan pada paradigma baru, yaitu kebijakan yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya menyadari akan perlunya kebijakan energi nasional yang dimaksudkan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat umum. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Sasaran Kebijakan Energi Nasional yang dimaksudkan adalah mencapai elastisitas energi lebih kecil dan 1 (satu) pada tahun 2025. Untuk itu akan diusahakan terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional:

- minyak bumi menjadi kurang dan 20% (dua puluh persen).
- gas bumi menjadi lebih dan 30% (tiga puluh persen).
- batubara menjadi lebih dan 33% (tiga puluh tiga persen).
- bahan bakar nabati (*biofuel*) menjadi lebih dan 5% (lima persen).
- panas bumi menjadi lebih dan 5% (lima persen).
- energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dan 5% (lima persen).
- batubara yang dicairkan (*liquefied coal*) menjadi lebih dan 2% (dua persen).

Mewujudkan primary energy mix yang diharapkan adalah tugas yang sangat berat yang membutuhkan tindakan nyata yang sistematis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Untuk menurunkan elastisitas energi menjadi kurang dari satu (1) pada tahun 2025 dibutuhkan kebijakan dan atau tindakan yang bersifat harga dan non harga yang jelas.

Dalam kondisi seperti saat ini juga harus dapat dijelaskan apakah kebijakan energi nasional akan mendahulukan *pro-poor* dari *pro-job* dan *pro-growth*. Bagaimanapun juga implikasi dari *pro poor* melalui kebijakan energi nasional akan menciptakan kendala bagi penggunaan harga sebagai instrumen untuk menciptakan rasionalisasi pemakaian sumber energi dan menciptakan efisiensi pemanfaatan energi. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa ketidakjelasan tujuan atau keinginan mencapai tujuan ganda merupakan sumber kegagalan utama dari usaha yang dilakukan pemerintah.

#### **D. KONDISI INFRASTRUKTUR**

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu pilar utama yang menopang daya saing di era dunia tanpa batas (*borderless world*) atau dunia datar (*flat world*). Karena, fenomena baru ini berimplikasi pada pergeseran determinan daya saing dari yang tadinya lebih dipengaruhi oleh kos variabel menjadi kian dipengaruhi oleh kos tetap. Adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memberikan sumbangan pada penurunan kos tetap ini.

Pengaruh kondisi infrastruktur paling terasa pada industri manufaktur dan sektor peranian. Hal inilah yang turut membuat sektor tradable kita terseok-seok sehingga memunculkan dualisme model baru: disparitas sektor *tradable* versus sektor *non-tradable*.

Kemerosotan daya saing dan daya tarik investasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga dekat dapat pula dijelaskan oleh komitmen pemerintahnya dalam membangun infrastruktur. Di Thailand misalnya, pengeluaran untuk infrastruktur mencapai 15,4 persen dari PDB. Sementara itu di Vietnam 9,9 persen, di China 7,4 persen, dan di

Filipina 3,6 persen. Sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 3 persen saja.

Dalam beberapa waktu belakangan ini kelangkaan barang dan jasa semakin sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kelangkaan (*supply constraint*) yang berujung pada kenaikan harga barang dan jasa terjadi tidak hanya karena ketidakterediaan pasokan tetapi dalam banyak kasus karena tidak tersedianya infrastruktur ekonomi secara memadai. Kongesti di pelabuhan, kekurangan alat pengangkutan, jalan yang rusak semakin sering menjadi penyebab terjadinya kelangkaan barang di beberapa daerah.

Lebih jauh, perekonomian modern menuntut tersedianya sebuah jaringan infrastruktur ekonomi yang terpadu, terutama jalan, air, listrik, dan sarana telekomunikasi. Keterpaduan semacam ini akan menciptakan kelancaran kegiatan ekonomi.

## D. REKOMENDASI

### D.1. Eksternal

#### 26. Umum

##### a. **Koreksi Ketridakseimbangan Pertumbuhan**

Untuk mengoreksi ketidakseimbangan pertumbuhan sektoral, diperlukan pembenahan struktur insentif yang sekaligus dapat memerangi kemiskinan dan pengangguran. Adanya ketimpangan struktur insentif ini dapat juga terlihat secara konsisten dalam bentuk relatif rendahnya penyaluran kredit perbankan ke sektor industri manufaktur (relatif terhadap kredit perbankan ke sektor jasa-jasa modern), serta juga relatif rendahnya peningkatan harga saham perusahaan-perusahaan di sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika struktur insentif lebih netral, niscaya kegiatan-kegiatan yang berbasis sumber daya alam akan semakin berkembang sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah.

##### b. **Menekan Inflasi**

Untuk memerangi inflasi secara lebih seksama, diperlukan:

- Kebijakan moneter yang tangguh dan disiplin fiskal yang terjaga. Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia mengharapkan agar Bank Indonesia dapat lebih agresif melakukan intervensi jual di pasar valuta asing guna menolong penguatan nilai tukar Rupiah, terutama sekali dengan cara mendayagunakan hasil penerimaan valuta asing dari minyak dan gas bumi (migas). Stabilitas sektor keuangan pun harus menjadi fokus utama program sektor keuangan dan moneter, terutama sekali dengan munculnya ancaman "*contagious effect*" dari turbulensi sektor keuangan di Amerika Serikat yang telah memicu terjadinya "*risk aversion*" di kalangan para investor asing dan peluang terjadinya "*unwinding*" dari "*carry trade*".
- Penerapan kebijakan harga yang lebih berhati-hati. Tanpa instrumen pengaman yang ampuh, kebijakan yang menimbulkan disparitas harga akan menimbulkan dampak yang biayanya lebih mahal daripada penghematan subsidi dan menimbulkan ketakpastian baru.

##### c. **Kurva Imbal Hasil Obligasi**

Pemerintah diharapkan dapat mencegah kenaikan yang lebih tajam lagi dari kurva imbal hasil obligasi Pemerintah, akibat ancaman "*crowding out*" di pasar kredit di Indonesia, dengan cara melakukan diversifikasi jenis issuance dari obligasi pemerintah secara lebih cermat. "*Credit Crunch*" di Amerika Serikat dan naiknya tekanan inflasi di Indonesia, serta sangat besarnya kebutuhan pembiayaan defisit fiskal Pemerintah, memang telah menaikkan kurva imbal hasil surat-surat berharga di dalam negeri, termasuk harga obligasi pemerintah. Penurunan harga obligasi pemerintah yang juga disertai penurunan tajam suku bunga di Amerika Serikat (termasuk imbal hasil dari US *Treasury securities*) telah juga menaikkan premi resiko Indonesia.

##### d. **Inpres 6 Tahun 2007**

Kendati pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Sektor Riel dan UMKM, Kadin berpendapat bahwa kebijakan ini belum tersosialisasikan dengan baik dan dirasakan dampaknya di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Kadin merekomendasikan:

- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada UMKM melalui *linkage* program, Kadin Indonesia perlu mendorong agar pemerintah memanfaatkan Lembaga Penjamin Kredit yang telah ditambah modalnya sebesar 1,4 triliun oleh pemerintah untuk ikut melibatkan diri pada program tersebut.
- Agar fasilitas penjaminan dapat terlaksana sampai ke daerah-daerah, Kadin mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk secepatnya membentuk Lembaga Penjaminan Kredit yang melibatkan berbagai sumber dana.
- Dalam rangka memperkuat fungsi perbankan, terutama agar masing-masing bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Kadin Indonesia perlu mendesak pemerintah agar mengadakan pembedaan bank-bank BUMN yang ada.
- Berkaitan dengan penanganan sektor UMKM, mengingat begitu banyak persoalan yang dihadapi, hingga saat ini nampaknya upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu, diperlukan mekanisme penjaminan kredit melalui Perum Sarana Penjaminan Usaha (SPU) dan Askrindo dan penyediaan dana sebesar Rp. 1,4 triliun untuk dua lembaga penjamin kredit tersebut dan agar keberadaannya diperluas sampai di daerah-daerah dan melibatkan BPD, selain bank-bank pemerintah.

**e. Implementasi UU 44 Tahun 2007**

Mendesak pemerintah agar mengimplementasikan Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, berikut dengan Peraturan Pemerintah No. 46, 47 dan 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Batam, Bintang dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*).

## **27. Kebijakan Pangan**

**a. Penguasaan Suplai Pangan**

Dalam kondisi dinamika global yang sangat cepat, untuk menjadi pemenang pada era perang pangan, kebijakan pangan baik di tingkat pusat, maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu mulai diperluas, tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pangan penting, tapi perlu jauh bervisi ke depan pada penguasaan suplai pangan di tingkat regional dan global, serta mengutamakan kepentingan petani, nelayan, peternak dan pemilik perkebunan rakyat.

**b. Perbaiki Insentif**

Selain strategi ofensif seperti itu, Indonesia tetap perlu terus memperjuangkan perbaikan insentif (baca: proteksi) terhadap empat komoditas pangan strategis (beras, jagung, kedelai dan gula) di forum bilateral, regional maupun multi-lateral (WTO), melalui Kelompok G-33.

**c. Meningkatkan Kapasitas Petani**

Di tingkat mikro bisnis, Indonesia wajib melakukan serangkaian aksi nyata untuk meningkatkan kapasitas petani agar mampu memetik manfaat maksimal dalam keterkaitannya dengan pasar yang lebih luas. Perang pangan tidak akan dapat dimenangkan dengan suatu sistem kelembagaan dan mekanisme transaksi yang tertutup seperti selama ini. Ia menuntut suatu keterbukaan (*governance*) dengan prinsip-prinsip keadilan (*fairness*) yang dihormati secara bersama menuju pada kedaulatan pangan (*food sovereignty*).

**d. Kebijakan Pangan Jangka Pendek**

Di tingkat lapangan, kebijakan pangan jangka pendek melalui intervensi di bidang perdagangan seperti dalam hal pajak ekspor, bea masuk, tarif mungkin masih diperlukan, walaupun tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang permanen.

Elemen kebijakan untuk meningkatkan aspek ketersediaan faktor produksi pangan, seperti pupuk, pestisida, dan lain-lain adalah elemen dasar yang harus menjadi prioritas para pengambil kebijakan, dari tingkat pusat sampai daerah. Terakhir, kebijakan pangan perlu juga diarahkan untuk melakukan perubahan fundamental dalam hal pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, riset dan pengembangan (R&D), sistem insentif dan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.

**e. Mekanisme Lindung Nilai (Hedging)**

Berhubung komoditas pangan (dan pertanian lainnya) mengandung risiko usaha seperti faktor musim, jeda waktu (*time-lag*), perbedaan produktivitas dan kualitas produk, maka mekanisme lindung nilai (*hedging*) perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh. Instrumen pasar lelang dan resi gudang adalah langkah awal yang perlu dikuasai dan dikembangkan untuk melindungi petani, menjamin kepastian usaha dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.

## **28. Kebijakan Energi**

**a. Intesifikasi Produksi Sumber Energi**

Kebijakan energi yang mengurangi ketergantungan pada minyak bumi adalah kebijakan yang arahnya telah tepat walaupun hal tersebut tidak berarti mengendorkan usaha melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi bilamana dimungkinkan. Sejalan dengan hal tersebut, usaha untuk memproduksi sumber energi seperti batu bara, gas, biodiesel, panas bumi, dan tenaga surya harus dilakukan secara lebih intensif.

**b. Peningkatan Peran Swasta**

Makin mendesak peningkatan peran swasta dalam pengembangan energi nasional. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada pihak swasta agar bersedia memproduksi sumber energi sesuai kebutuhan. Adalah suatu yang sering dikemukakan bahwa di daerah tertentu perkembangan ekonomi menjadi terhambat karena listrik atau energi yang dibutuhkan tidak tersedia, padahal di daerah tersebut terdapat sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Untuk itu, yang menjadi syarat penting ialah memberikan perlindungan bagi swasta yang menjadi pionier dalam perusahaan listrik swasta yang inovatif dan ramah lingkungan.

**c. Pemasok Listrik dan PLN**

Selama ini PLN tidak dapat bertindak secara *feasible* dalam menghasilkan tenaga listrik antara lain karena sentralisasi di PLN yang sangat kuat dan ketergantungan PLN pada anggaran (APBN). Kenaikan harga minyak dalam beberapa waktu belakangan ini telah menyebabkan subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah untuk "kegiatan yang kurang atau tidak produktif" meningkat secara pesat. Keadaan seperti ini harus dihindarkan secara sistematis. Kebijakan yang diperlukan adalah menghubungkan mereka yang membutuhkan energi dengan mereka yang bersedia memproduksi energi tersebut dengan harga yang terjangkau. PLN sebagai perusahaan yang berhak membeli dan menjual listrik tampaknya perlu mempermudah terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok (produsen) dan konsumen.

Sudah sering dikemukakan bahwa untuk beberapa wilayah tertentu telah terjadi krisis tenaga listrik dan krisis tersebut paling cepat dapat diatasi pada tahun 2010. Beberapa informasi menguakkan bahwa krisis energi di daerah tertentu menjadi semakin parah karena beberapa produsen yang sudah mendapat izin dari PLN tidak menggunakan izin yang diperolehnya secara benar atau tidak melakukan kegiatan produksi listrik sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Bagaimanapun juga PLN di bawah direksi baru harus melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut.

**d. Peraturan Presiden 5 Tahun 2006**

Kebijakan energi nasional seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 hanya akan dapat direalisasikan bila terjalin kerjasama yang saling mendukung diantara departemen terkait. Di samping Menteri ESDM, Departemen yang harus terlibat adalah Departemen Keuangan. Keterlibatan Departemen Keuangan menentukan langkah atau tindakan yang diterapkan adalah mutlak karena hanya dengan cara seperti ini Kebijakan Harga untuk tujuan tertentu dapat dilakukan dengan baik.

**e. Energi dan Kemiskinan**

Masalah energi adalah masalah yang sangat mendesak untuk dipecahkan. Setiap keterlambatan melakukan tindakan yang tepat akan menjauhkan pemerintah dari keinginan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di negeri ini.

**29. Kebijakan Infrastruktur**

**a. Perbaikan Infrastruktur**

Perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan dengan segera dan terencana, yang dalam hal pelaksanaannya menyesuaikan dengan siklus musim dan memperhatikan fenomena perubahan iklim.

**b. Pembangunan Infrastruktur**

Percepatan pembangunan infrastruktur seperti dermaga, pelabuhan dan pergudangan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan volume perdagangan di masa depan.

**c. Partisipasi Swasta**

Menciptakan iklim dan kondisi yang lebih memungkinkan pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya, listrik, dan jembatan. Hal ini bisa diwujudkan antara lain melalui kemudahan penyediaan lahan dan jaminan investasi jangka panjang.

**d. Peranan Kereta Api**

Penyediaan berbagai moda transportasi yang sesuai dengan kondisi alam dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini perlu dipikirkan perluasan peranan kereta api yang berpotensi memiliki skala keekonomian (*economies of scale*) yang memadai dan ramah lingkungan.

**D.2. Internal**

**30. PP Undang-Undang Kadin**

Perlu upaya khusus yang harus dilaksanakan guna meningkatkan jumlah anggota Kadin, dengan mengupayakan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1987, yang memuat antara lain:

- a. Persyaratan perusahaan untuk menjadi anggota Kadin dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.
- b. Mekanisme kemitraan antara Kadin dan pemerintah.
- c. Hal-hal lain yang mendorong peningkatan kapasitas Kadin dan anggotanya .

**31. Penyempurnaan Keppres 80 Tahun 2003**

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah anggota Kadin, meminta Pengurus Kadin Indonesia untuk terus menerus mengikuti penyempurnaan Kepres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa, dengan memperhatikan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal dan peningkatan kerjasama Kadin dengan pemerintah.

**32. Peraturan Presiden 106 Tahun 2007**

Dewan Pengurus Kadin Indonesia perlu meminta klarifikasi kepada pemerintah tentang isi Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 terkait dengan peran Kadin dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN/BUMD.

### **33. Pembangunan Kapasitas Kadin**

Dalam rangka meningkatkan *capacity building*, Kadin perlu:

- a. Lebih memberdayakan fungsi Asosiasi dan Komite Bilateral/Multilateral yang ada di lingkungan Kadin.
- b. Segera mengeluarkan kebijakan restrukturisasi atau melakukan penggantian terutama terhadap kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota yang tidak aktif atau sudah habis masa baktinya, melalui mekanisme Musyawarah Kabupaten (Muskab)/Musyawarah Kota (Muskot), dengan meminta Kadin Provinsi untuk melaksanakan hal tersebut.

### **34. Public Private Partnership**

Berkenaan dengan Kemitraan Kadin dengan pemerintah Indonesia dengan pemerintah pusat perlu diperluas dengan kemitraan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah dan mendorong tumbuhnya Public Private Partnership (PPP) baik di tingkat pusat maupun daerah.

### **35. Kadin sebagai Jembatan Penghubung**

Dalam rangka memperjuangkan berbagai peraturan perundang-undangan, Kadin diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara dunia usaha dengan pemerintah dan DPR, guna memperjuangkan kepentingan dunia usaha Indonesia dan mempercepat lahirnya peraturan perundang-undangan terkait.

### III

## PROGRAM KADIN 2008

### A. UMUM

Rapimnas Kadin 2008 telah membahas rangkaian program kerja dalam 14 kelompok menurut bidang koordinasi para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Secara keseluruhan, program kerja Kadin Indonesia disusun terutama untuk memenuhi salah satu fungsi utama Kadin, yakni mewakili dunia usaha dalam forum-forum penentuan kebijakan. Program kerja yang diringkaskan dalam laporan hasil Rapimnas ini adalah yang sesuai dengan upaya mewujudkan Kebijakan Strategis berupa Visi Pembangunan Industri 2030 dan Roadmap Industri 2010 sebagai Kebijakan Strategis, dan Langkah Taktis sebagai pedoman pelaksanaannya. Program-program tidak dikelompokkan menurut bidang koordinasi pawa wakil ketua umum, tetapi menurut substansi permasalahannya.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, REGULASI DAN KEBIJAKAN

Pertumbuhan dunia usaha dalam beberapa tahun terakhir relatif lambat. Beberapa kendala terutama bersumber pada peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang kurang kondusif. Untuk membentuk iklim usaha yang lebih mempercepat pengembangan dunia usaha, termasuk untuk peningkatan investasi, perlu ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan lainnya. Kadin sebagai wakil dunia usaha dalam forum penentuan kebijakan telah menginventarisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang perlu ditetapkan, direvisi atau dikaji ulang, ataupun perlu segera ditetapkan peraturan pelaksanaannya, bahkan ada yang cenderung ditolak.

#### 36. Program Legislasi Nasional

Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan disejalkan dengan Program Legislasi Nasional 2008 yang ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR-RI, khususnya yang terkait dengan kegiatan dunia usaha, yakni:

- 1) RUU tentang Administrasi Pemerintahan
- 2) RUU tentang Demokrasi Ekonomi
- 3) RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) RUU tentang Jaminan Produk Halal
- 5) RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
- 6) RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- 7) RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan
- 8) RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
- 9) RUU tentang Keimigrasian
- 10) RUU tentang Kelautan
- 11) RUU tentang Kepariwisata
- 12) RUU tentang Kesehatan (pengganti UU No.23 Tahun 1992)
- 13) RUU tentang Ketenagalistrikan
- 14) RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
- 15) RUU tentang Lahan Abadi Pertanian
- 16) RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
- 17) RUU tentang Mata Uang
- 18) RUU tentang Pembangunan Perdesaan
- 19) RUU tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (*illegal logging*)
- 20) RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 21) RUU tentang Pengelolaan Sampah
- 22) RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
- 23) RUU tentang Penggunaan Lahan Untuk Pembangunan
- 24) RUU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 25) RUU tentang Perampasan Aset

- 26)RUU tentang Perbankan Syariah
- 27)RUU tentang Perposan
- 28)RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 29)RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 30)RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- 31)RUU tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 32)RUU tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- 33)RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- 34)RUU tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 35)RUU tentang Perubahan atas UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 36)RUU tentang Perubahan Atas UU No.56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- 37)RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 38)RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 39)RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- 40)RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- 41)RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 42)RUU tentang Reformasi Agraria sebagai Perubahan atas UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- 43)RUU tentang Rumah Sakit
- 44)RUU tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional
- 45)RUU tentang Standar Pelayanan Publik
- 46)RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- 47)RUU tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
- 48)RUU tentang Transfer Dana
- 49)RUU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **37. RUU tentang Logistik dan Distribusi**

Merumuskan masukan untuk penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan (RUU) Logistik untuk mengantisipasi diberlakukannya ASEAN Economic Community, yang dalam tahap pertama mencakup 7 sektor bidang produksi (agriculture, otomotif, elektronik, perikanan, karet, tekstil dan garmen, kayu) dan 5 bidang jasa (travel, e-ASEAN, Jasa Kesehatan, Jasa Tourism, Jasa Logistik Services) sektor jasa yang akan diintegrasikan mulai tahun 2008 s/d 2012 (secara bertahap).

### **38. RUU Perdagangan**

Melanjutkan pembahasan RUU Perdagangan bersama Pemerintah c.q Departemen Perdagangan. Selain pembahasan RUU, Kadin Indonesia juga harus aktif dalam proses penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan berbagai undang-undang yang masih perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan, khususnya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri.

### **39. Reformasi Peraturan Perundang-undangan Perburuhan**

Mereview kebijakan Peraturan Perundang-undangan antara lain UU No. 3/1992 Tentang Jamsostek, UU No. 21/2000 Tentang SP/SB, UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2/2004 Tentang PPHI ; Mengupdate daftar inventarisasi masalah peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Perda-perda yang dinilai bermasalah bagi terciptanya iklim usaha dan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

### **40. RUU Jamsostek**

Sehubungan dengan undangan RDPU/Hearing Komisi IX DPR RI kepada Organisasi Pengusaha dan SP/SB yang mengambil inisiatif menerbitkan RUU Jamsostek, maka diperlukan sikap, mengingat aspirasi dunia usaha dan SP/SB adalah mengamandemen UU No. 3/1992 tentang Jamsostek.

Reformasi UU Perburuhan : UU No. 3/1992 tentang Jamsostek, prioritas pertama :

- a. Proyek Restrukturisasi Sistem Jaminan Sosial :
  - Telah sering dilakukan pertemuan untuk membahas status Jamsostek.
  - Secara informal telah dicapai konsensus bahwa bentuk Persero harus dirubah menjadi bentuk Wali Amanah (Trust Fund) yang diawasi oleh unsur Tripartit.
  - Lokakarya mengenai hal tersebut telah dilakukan di Jakarta dan di 5 (lima) daerah, yang seluruhnya menyepakati bentuk Wali Amanah dimaksud.
  - Sementara RUU tentang perubahan UU No. 3 Tahun 1992 dipersiapkan dan diusulkan ke DPR, perlu juga dipersiapkan pembentukan kelembagaan, ternyata telah diubah oleh Komisi IX DPR RI menjadi RUU Jamsostek.
- b. Rekomendasi ILO mengenai Perubahan Status Jamsostek: Pada dasarnya ILO menyarankan agar proses perubahan status PT. Jamsostek tetap diteruskan.
- c. Istilah "*Trust Fund*" atau Wali Amanah untuk Jamsostek berarti harus didukung kekuatan hukum yang menyatakan badan independen dari Pemerintah.
- d. Hanya bertanggung jawab kepada DPR melalui Badan Komisaris Wali Amanah, Menteri atau Presiden dalam bentuk penyampaian laporan tahunan, laporan khusus atau laporan periodik.
- e. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan audit publik tahunan dan evaluasi aktuaris.
- f. Disarankan supaya Jamsostek sebagai lembaga independen berada hanya di bawah pengawasan:
  - Presiden;
  - Tripartite Board of Trustees;
  - Presiden Direktur.

#### **41. Pelaksanaan UU No. 40/2004 Tentang SJSN**

Undang-Undang 40/2004 tentang SJSN akan mulai diberlakukan pada tahun 2009 memerlukan kajian secara komprehensif karena terkait dengan UU lain yang mengandung beban biaya bagi dunia usaha.

### **C. INFRASTRUKTUR, LISTRIK DAN ENERGI**

#### **42. Infrastruktur**

Mendirikan lembaga pembiayaan investasi infrastruktur yang *independent* (non-bank) guna memfasilitasi pembangunan infrastruktur di berbagai sektor di daerah.

#### **43. Infrastruktur Perhubungan**

Merumuskan kebijakan pembenahan dan pembangunan infrastruktur transportasi laut, udara, dan darat untuk kelancaran arus barang ekspor-impor agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap dapat dijaga dan ditingkatkan.

#### **44. Biofuel (BBN, Bahan Bakar Nabati)**

Berkoordinasi dengan asosiasi terkait di bidang industri BBN dan perkebunan penghasil bahan baku untuk mengatasi masalah2-nya sehingga penggunaan BBN di Indonesia bisa sesuai target. Industri BBN di Indonesia belum berkembang sesuai harapan disebabkan beberapa kendala antara lain kurang tersedianya bahan baku dengan harga yang bersaing dan belum adanya keharusan pemakaian BBN di Indonesia.

#### **45. Geotermal**

Besama-sama dengan asosiasi panas bumi mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan peraturan hukum untuk menggairahkan investasi di bidang pembangkit listrik Geotermal. Juga terus mengusahakan tarif PPA dari PLN yang lebih menarik. Indonesia memiliki cadangan Geotermal yang terbesar di dunia akan tetapi penggunaannya didalam energi mix nasional masih kecil sekali disebabkan beberapa kendala.

#### **46. Tenaga Surya**

Mendorong tercapainya produksi lokal di bidang Panel Tenaga Surya di Indonesia dan mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di perkotaan dengan system Grid Connected. Indonesia memiliki sinar matahari yang cukup besar, tetapi penggunaan Tenaga Surya masih terbatas karena Indonesia tidak memiliki pabrik Panel Tenaga Surya sehingga masih sangat tergantung impor.

#### **47. Pengembangan Energi Baru**

Mendorong terciptanya iklim investasi yang baik untuk pengembangan energi baru yang sudah mampu bersaing dan cukup tersedia di Indonesia. Penggunaan energi baru seperti coal bed methane, coal liquifaction dsb perlu terus dikembangkan teknologi dan penetrapannya.

#### **48. Kebijakan Energi Migas**

Kebijakan Energi Nasional sangat diperlukan untuk kesinambungan pelaksanaan Peta Jalan atau road map yang mendukung berkembangnya pengusaha Migas Nasional, sudah selayaknya kemampuan SDM dan Modal dalam Negeri menjadi prioritas dalam pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya Minyak dan Gas serta industri pendukungnya. Perlu dilihat semua Kebijakan Energi Nasional yang bertumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, antara Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertentangan sehingga dapat menghambat Peta jalan yang sudah dicanangkan. Sementara itu Peta Jalan yang sudah ada perlu ditinjau ulang untuk menyelesaikan persoalan – persoalan serta mencari solusi – solusi untuk memperkuat ketahanan energi di negara ini terutama terkait pada minyak dan gas bumi. Perlu komunikasi lintas Departemen sehingga fungsi Kadin Indonesia dapat menjadi penghubung di berbagai Departemen terkait. Bentuk konkrit dari kegiatan ini adalah dalam jangka waktu satu tahun sudah dapat diperoleh Peta Jalan untuk Kebijakan Energi Nasional yang meliputi Peta Jalan yang sudah direvisi dan daftar peraturan yang tumpang tindih serta usulan perbaikannya.

#### **49. Peningkatan dan Percepatan Produksi Migas Nasional**

- a. Dalam situasi sekarang ini peningkatan Produksi Migas Nasional sangat menjadi prioritas disamping masalah subsidi BBM. Kadin Indonesia perlu mencarikan jalan agar target peningkatan Produksi Migas di Indonesia dapat tercapai sesuai arahan Pemerintah. Sebagai partner Pemerintah, Kadin Indonesia perlu melihat faktor-faktor SWOT untuk mencapai sasaran ini. Masukan-masukan dari pelaku usaha dengan menggalang komunikasi dengan Asosiasi-asosiasi anggota Kadin yang berkaitan dengan Industri Migas dan industri pendukungnya sangat penting, Jika perlu dibuat Gugus Tugas untuk ini dan dibuat rapat rutin di Komite Tetap Hulu Migas minimal 2 bulan sekali sehingga para pemangku kepentingan atau Stake holder dunia usaha Migas dapat berkontribusi dengan maksimal.
- b. Mengoptimalkan nasionalisasi dan pemanfaatan ladang minyak di Indonesia yang diusahakan oleh pengusaha asing yang telah habis masa kontraknya bagi kepentingan nasional.

**50. Pelatihan Pengetahuan Migas untuk Pers dan Perbankan Sebagai Bagian dan Stakeholder**

Sudah dilaksanakan beberapa kali pertemuan di Bank Indonesia yang diprakarsai oleh Kadin Indonesia Komite Tetap Hulu Migas antara pengusaha Migas, para Pakar Migas dan Direksi Perbankan serta Divisi Risk Management Perbankan Indonesia, hal ini positif dengan hasil kenaikan yang meningkat tajam jumlah kredit Bank Nasional dan asing di Indonesia kepada pengusaha Migas dan industri pendukungnya, program ini akan dilanjutkan di tahun 2008 dan ditambah dengan memberikan pelatihan kepada Pers tentang seluk beluk usaha dunia Migas dan industri pendukungnya karena Pers sangat mempengaruhi opini publik untuk memberikan berita objektif dalam menyampaikan berita-berita dunia Migas.

**51. Peningkatan Investasi dalam Industri Hulu Migas**

Guna memaksimalkan perkembangan industri hulu migas, Kadin perlu memfasilitasi antara calon investor luar dan dalam negeri dan pemerintah serta para stakeholder terkait untuk agar dapat bersinergi guna peningkatan investasi dalam industri ini.

Industri migas memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, dibuktikan salah satunya oleh kontribusi yang cukup besar terhadap pemasukan APBN. Akan tetapi, industri Hulu migas merupakan industri yang membutuhkan permodalan yang sangat besar serta memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Maka dari itu, tingkat investasi di industri ini sangat berdampak pada perkembangan industri hulu migas.

**52. Implementasi dan Peningkatan Produk dan Jasa Dalam Negeri**

Kadin bersama pemerintah berusaha mendorong bertambahnya pemain-pemain lokal dalam industri migas yang berkualitas khususnya penunjang migas. Bimbingan dan keberpihakan pemerintah harus dilakukan guna meningkatkan daya saing pemain lokal baik dari sisi ataupun kualitas dengan pemain-pemain global.

**53. Pelatihan Bisnis Sektor Hilir Minyak dan Gas**

Akan dilakukan Training / Pelatihan pemahaman kegiatan sektor hilir migas kepada para perbankan dan calon pemain bisnis sektor hilir migas. Melalui pelatihan ini diharapkan perbankan sebagai penyandang dana dan calon pengusaha baru sektor hilir migas memahami dasar hukum, peluang serta faktor resikonya.

**54. Komoditi Minyak dan Gas Bumi Dalam Peranannya Sebagai Salah Satu Sumber Energi**

Dari sudut pandang energi, maka gas bumi dan BBM hanyalah bagian dari sumber energi yang tersedia ataupun harus disediakan di dalam negeri. Manajemen migas sebagai sumber energi harus dimasukkan ke dalam mata rantai kebijakan energi nasional. Supply dan demand sumber-sumber energi harus memperhitungkan faktor-faktor efisiensi, seperti peniadaan pengurangan atau penghapusan subsidi secara bertahap melalui pricing policy yang benar, diversifikasi sumber-sumber energi lainnya yang paling menguntungkan seperti panas bumi, bio-fuel dan lain-lain.

Dalam konteks ini terdapat beberapa langkah antara yang akan ditempuh pemerintah melalui konversi minyak tanah ke LPG, de-bottlenecking kebijakan harga gas bumi dan BBM untuk mendorong pertumbuhan pemanfaatan sumber panas-bumi dan energi bio-fuel.

**55. Komoditi Minyak dan Gas Bumi Dalam Peranannya Sebagai Komponen Bahan Baku Industri**

Komoditi minyak dan gas bumi seharusnya diarahkan kepada industri proses yang paling besar memberikan nilai tambah. Dalam konteks ini patut untuk dimunculkan kembali wacana yang mempertanyakan kebijakan niaga gas bumi melalui pipa, LNG

storage, sumber pembangkitan ketenagalistrikan atau diarahkan kepada kegiatan industri petrokimia lainnya. Meskipun harus disadari adanya dilema yang dihadapi oleh komoditi gas bumi sebagai bahan baku industri pupuk guna menunjang bidang pertanian.

#### **56. Road Map Kebijakan Hilir Migas**

Melihat kompleksitas permasalahan hilir migas nasional tersebut di atas, maka Kadin Indonesia akan mendorong disusunnya road-map pengelolaan kegiatan hilir migas dan implementasi kebijakan energi nasional melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang memadai secara lintas sektoral yaitu ESDM, BKPM (investment policy), Keuangan (fiscal policy - pajak dan kepabeanan), Industri ( industrial policy), pembinaan sumber daya manusia (bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan).

Di samping itu, pengelolaan bidang hilir akan lebih efektif lagi bilamana dikaitkan juga bidang hulu. Sebab sebagian permasalahan hilir merupakan ikutan atau konsekuensi dari kebijakan di bidang hulu seperti CBM, pengolahan lapangan, crude trading dan lain- lain.

#### **57. Pembatasan Pemakaian BBM**

Memberikan masukan kepada Pemerintah tentang rencana Kebijakan Pembatasan Pemakaian BBM (Smart Card), yang akan menjadi kendala pertumbuhan ekonomi (hambatan pada laju pertumbuhan ekonomi).

- a. Perlu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan, terkait dengan dengan kendala pertumbuhan ekonomi (hambatan pada laju pertumbuhan ekonomi).
- b. Mengusulkan ditunda untuk dipertimbangkan

#### **58. Pengadaan Energi Listrik**

- a. Kadin Indonesia agar mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pengadaan energi listrik di seluruh daerah.
- b. Mengusahakan skema khusus yang masuk ke dalam *crash program* pembangkit tenaga listrik 5 MW ke bawah.

#### **59. Diskusi dengan Stakeholder Ketenagalistrikan**

- a. Menyelenggarakan diskusi dengan stakeholder ketenagalistrikan yang menyangkut issue-issue strategis dan aktual di sektor ketenagalistrikan
- b. Berperan aktif dalam kesempatan forum, seminar atau konferensi baik sebagai pembicara, moderator atau peserta.
- c. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan institusi pemerintah yang terkait, PT. PLN (Persero) sebagai PKUK di sektor ini, para developer listrik swasta dan para pelaku di industri penyedia dan penunjang tenaga listrik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan permasalahan yang akan datang.

#### **60. Industri Jasa dan Produk Kelistrikan Dalam Negeri**

Berperan serta secara aktif dalam terus menggalakan peningkatan industri jasa dan produk kelistrikan dalam negeri baik dalam penerbitan regulasi yang terkait maupun menggalang rekan-rekan dalam asosiasi untuk terus menggerakkan kekuatan pada industri ini karena berkembangnya industri ini akan besar peranannya dalam pergerakan sektor rill nasional yang sudah sangat terpukul.

#### **61. Pembentukan Komite Ad Hoc**

Membentuk komite atau badan teknis/khusus atau komite khusus yang bersifat ad hoc. Komite ad hoc ini akan memiliki bidang hukum dan kebijakan, pengembangan usaha, teknik, dan komunikasi. Tujuannya:

- a. Membantu penyelesaian permasalahan antara dunia usaha dengan pemerintah.
- b. Memberdayakan organisasi perusahaan dan asosiasi profesi di sektor pertambangan.
- c. Meningkatkan komunikasi antara lembaga usaha, profesi, dan pemerintah.
- d. Memperkokoh persatuan dan kesatuan diantara lembaga-lembaga usaha, profesi dan pemerintah.
- e. Melakukan sosialisasi pencitraan yang positif bagi sektor pertambangan.

## **62. Penyelesaian Konflik**

Meningkatkan kerjasama dengan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) sebagai asosiasi profesi yang independen di sektor pertambangan untuk:

- a. Membantu penyelesaian konflik/ketidakharmonisan jika terjadi antara dunia usaha dengan pemerintah.
- b. Memonitor perkembangan atas upaya-upaya yang telah dilakukan.
- c. Merperkokoh persatuan dan kesatuan diantara stakeholder pertambangan.
- d. Meningkatkan citra positif pertambangan.
- e. Membantu penyelesaian berbagai permasalahan di sektor pertambangan.

## **E. KEBUJAKAN PUBLIK**

### **63. Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam rangka sosialisasi dan pengembangan penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual, akan diterjemahkan buku-buku WIPO (World Intellectual Property Organization) kedalam Bahasa Indonesia

### **64. Perhimpunan Pembayar Pajak (*Tax Payer Association*)**

Melanjutkan usaha pembentukan *Tax Payer Association* yang dapat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi Wajib Pajak yang belum dapat dibentuk pada Tahun 2007.

### **65. Seminar Perpajakan**

Melanjutkan penyelenggaraan Seminar Perpajakan baik yang dilaksanakan oleh Kadin sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain / organisasi profesi lainnya.

### **66. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Memantau kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan memperjuangkan agar pemerintah menaikkan NJOP secara wajar

### **67. Kredit ke Dunia Usaha**

Mendorong bank pemerintah dan bank swasta nasional untuk tetap konsisten sebagai penggerak dunia usaha dengan memberikan porsi kredit sebesar-besarnya kepada sektor UKM dengan persyaratan yang lebih luwes (flexible)

### **68. Pemberantasan Penyelundupan**

Ikut serta dalam mengurangi dan memberantas penyelundupan yang sangat merugikan perekonomian Negara, antara lain dengan memberi masukan tentang modus operandi penyelundupan yang diketahui atau dialami efeknya.

### **69. Pelayanan Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Ikut berperan dalam rangka pengawasan masyarakat terhadap kinerja Bea dan Cukai serta institusi di pelabuhan dan bandara, termasuk pergudangan dan pengangkutan

yang dirasakan masih belum membaik serta masih berpotensi menghambat. Proses pengeluaran barang serta kemungkinan masih adanya pungutan-pungutan yang memberatkan dan hal-hal yang mempersulit proses tersebut. Hal ini terutama perlu diperbaiki sehubungan dengan apakah dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Tanjung Priok dan Batam serta adanya renumerasi penerimaan pegawai Bea dan Cukai menjadi lebih besar, berpengaruh pada pelayanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai serta institusi pelabuhan.

#### **70. Anti-Dumping**

Mengusulkan dan ikut memproses mengenai perubahan ketentuan tentang pelaksanaan Bea Masuk Anti Dumping kepada agar prosedur permohonan anti-dumping diperbaiki, karena tenggang waktu penyelesaian permohonan anti-dumping atas suatu barang impor, seringkali memakan waktu yang lama. Diusulkan agar pada saat penyelidikan terhadap dugaan adanya barang impor yang dimasukkan dengan harga dumping tersebut dimulai, maka impor barang tersebut dihentikan sementara atau diharuskan mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk anti dumping yang dapat dikenakan atas barang impor tersebut.

#### **71. National Single Windows (NSW)**

Memonitor efektivitas pelaksanaan NSW dilapangan apakah benar dapat mempesingkat waktu pelayanan pengeluaran barang terutama di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan apakah ada pengaruh terhadap perubahan status Kantor Pelayanan Tanjung Priok menjadi KPU yang setingkat dengan Kantor Wilayah yang jenjang birokrasinya menjadi bertambah.

### **E. INVESTASI**

#### **72. Perbaikan Iklim Investasi**

- a. Membahas perbaikan iklim investasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan Menko Perekonomian.
- b. Melakukan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah dan lembaga perbankan multilateral dan investor.

#### **73. Regional Forum & Business Gathering**

- a. Mengkomunikasikan proyek-proyek infrastruktur (market sounding) di daerah kepada anggota Kadin.
- b. Membangun jaringan bisnis bagi para anggota Kadin yang dikhususkan anggota Kadin di daerah.

### **F. INDUSTRI**

#### **74. Restrukturisasi Industri**

Restrukturisasi total industri nasional dan peningkatan peran *supporting industry* berskala kecil dan menengah

- a. Restrukturisasi Total Industri Nasional melalui Pengembangan Jaringan Kerjasama antara Hulu & Hilir, *Supporting Industry*.
- b. Reorientasi kebijakan industri, fokus pada pengembangan industri berbasis SDA, sebagai motor penggerak kesempatan kerja.
- c. Konsolidasi kekuatan industri nasional dalam menghadapi meningkatnya biaya energi dan menurunnya kualitas infrastruktur ekonomi Indonesia. terutama pada industri padat modal dan teknologi, seperti otomotif, TPT dan elektronika.

#### **75. Revitalisasi Industri**

Peningkatan produktivitas dan daya saing, inovasi produk industri nasional Indonesia, antara lain dengan mengembangkan program dan kebijakan:

- a. Revitalisasi dan integrasi kelembagaan dalam satu *task force*.
- b. Sosialisasi dan negosiasi agar terjadi modernisasi pada alat produksi industri TPT
- c. Sosialisasi dan negosiasi agar tercipta paket-paket kebijaksanaan pemerintah yang kompetitif untuk penanaman modal di dn, serta mendorong dilaksanakannya promosi-promosi peluang investasi di Indonesia.
- d. Sosialisasi dan negosiasi perlunya peningkatan produktivitas yang setara dengan negara pesaing melalui pendekatan *bench marking*
- e. Sosialisasi dan Negosiasi perlunya Peningkatan Perlindungan Pasar Dalam Negeri
- f. Revitalisasi industri kecil menengah padat tradisi dan keterampilan seni budaya lokal (seperti batik, jamu, industri kulit, dst) untuk bersaing di pasar domestik dan menjadi "*brand image*" Indonesia di pasar internasional, melalui desain dan standardisasi produk.

## **76. Industri Sarana Transportasi**

- a. Kadin Indonesia supaya mengusulkan kepada pemerintah agar program pembuatan kapal laut yang terbengkalai seperti Program Caraka Jaya dapat dilanjutkan (sesuai dengan Inpres No. Tahun 2005 yang berkaitan dengan Usaha Pelayaran Nasional). Diusulkan agar Kadin ikut dilibatkan dalam perencanaan dan perumusan *action plannya*.
- b. Memanfaatkan dan mendayagunakan kapal-kapal penangkap ikan yang sudah ada dan layak pakai namun tidak beroperasi pada departemen tertentu.
- c. Mengusulkan penyempurnakan UU Pelayaran dan meminta Kadin Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap RUU yang berkaitan dengan pelaku usaha agar dalam prakteknya RUU dimaksud dapat mendukung iklim dunia usaha.
- d. Membangun kebijakan nasional di bidang otomotif untuk membangkitkan industri dalam negeri.

## **G. PERTANIAN**

Program Bidang Pertanian dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kerja yang berkonsentrasi mengkaji permasalahan setiap komoditi dan merumuskan solusinya.

## **77. Ketahanan Pangan**

- a. Menginventarisasikan masalah ketahanan pangan serta hal-hal yang terkait ketahanan industri primer dan merumuskan alternatif pemecahan masalah.
- b. Melakukan koordinasi kerja antara Kadin pusat dan daerah yang memfokuskan pada ketahanan pangan. Kemudian melakukan raker di masing-masing daerah untuk melakukan sinkronisasi dengan program kerja pusat. Raker akan membahas permasalahan daerah, potensi dan koordinasi kerja yang bermanfaat bagi masing-masing daerah. (Catatan: Potensi daerah akan disinergikan dengan Program OVOP Jetro).

## **78. Peningkatan Produksi Daging**

- a. Memanfaatkan fungsi dan peran tim ketahanan pangan di pusat dan daerah.
- b. Mendorong asosiasi dan pengusaha mempunyai program peningkatan populasi ternak potong dan ternak perah.
- c. Bersama pemerintah merancang dan menggalakkan program pertumbuhan ternak (ternak potong dan ternak perah).
- d. Mendorong berkembangnya ekspor daging olahan maupun produk peternakan lainnya.

- e. Memonitor dan mengevaluasi terjadinya wabah penularan penyakit ternak (misal penyakit mulut dan kuku, penyakit antraks, penyakit sapi gila) dan penularan penyakit dari hewan ke manusia, seperti rabies.
- f. Mengupayakan penyempurnaan gizi masyarakat melalui konsumsi pangan hewani murah (misal daging unggas).
- g. Melakukan upaya-upaya untuk menghapus mata rantai penularan virus unggas ke manusia.
- h. Asosiasi dan pengusaha mempunyai program peningkatan populasi ternak sapi khususnya sapi potong dan sapi perah.
- i. Bersama pemerintah menggalakkan mempromosikan program pembibitan ternak baik sapi (perah dan potong), domba dan kambing.
- j. Menggalakan ekspor daging olahan selama tahun 2008.
- k. Memantau dan mengevaluasi perkembangan penularan penyakit ternak di Indonesia yaitu : penyakit rabies, mulut dan kuku, antrak dan sapi gila.
- l. Kadin Indonesia dan pemerintah membantu pengembangan proyek-proyek peternakan sapi skala kecil (UMKM) dalam rangka peningkatan pendapat peternak (petani).
- m. Penyelenggaraan pameran-pameran atau seminar-seminar di bidang peternakan.

## **79. Beras**

Peningkatan ketahanan pangan melalui ketersediaan beras nasional (sesuai UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan)

- a. Memantau perkembangan peningkatan produksi beras nasional dalam rangka mencapai kecukupan beras dalam negeri melalui bantuan langsung benih- unggul kepada petani (dalam hal ini secara cermat mewaspadaai beredarnya bibit padi palsu).
- b. Mempelopori pembangunan industri padi dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pengusaha padi.
- c. Mendorong pengembangan produksi dan pemasaran beras berlabel.
- d. Bersama pemerintah memperkuat kelembagaan petani padi di Indonesia
- e. Tenaga penyuluh dan tenaga pendamping pertanian harus segera ditambah.
- f. Bersama pemerintah mendorong pihak lembaga keuangan, bank dan non bank untuk meningkatkan alokasi dana pengembangan agribisnis beras.

## **80. Gula**

Memberikan masukan mengenai distribusi pemasaran gula nasional dalam rangka stabilisasi harga gula.

- a. Mendorong para pengusaha untuk merealisasikan pendirian atau pembangunan pabrik-pabrik gula baru diluar Jawa dan merehabilitasi pabrik-pabrik gula yang sudah tua di Jawa.
- b. Mengamati secara cermat peredaran gula dalam negeri baik yang berasal dari pabrik maupun dari impor termasuk gula rafinasi.
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan harga gula dalam negeri dan dunia dalam rangka stabilisasi harga gula dalam negeri.
- d. Memantau dan mengevaluasi konsumsi gula dalam negeri untuk konsumsi langsung dan keperluan makan dan minum.
- e. Bersama pemerintah aktif mendorong peremajaan tanaman tebu rakyat (rakunisasi) yang sudah berlangsung hingga tahun 2009.
- f. Bersama Pemerintah dan Asosiasi Gula Indonesia mendorong perkuatan Lembaga Petani Tebu Rakyat.

## **81. Perunggasan**

Peningkatan gizi dan konsumsi protein hewani dalam upaya peningkatan kesehatan dan kecerdasan melalui gizi makanan yang berprotein hewani tinggi melalui kampanye **"Lima Sehat dan Sempurna"**:

- a. Memantau dan mengevaluasi perkembangan penyakit flu burung selama tahun 2008 di Indonesia beserta cara mengatasinya oleh pemerintah/ pemda dan masyarakat perunggasan.
- b. Meningkatkan upaya-upaya pengadaan bibit unggas yang berkualitas dan tahan penyakit terutama flu burung.
- c. Berusaha mendorong peningkatan industri olahan daging unggas untuk meningkatkan konsumsi makanan yang berprotein hewani tinggi.
- d. Mendorong keterjaminan penyediaan pakan unggas yang berkualitas
- e. Bersama pemerintah, lembaga keuangan baik bank maupun non bank mengusahakan pendanaan relative murah (diberikan subsidi bunga) bagi pengembangan industri perunggasan didalam negeri.

## **82. Karet**

Meningkatkan produksi karet rakyat berkualitas melalui peremajaan tanaman karet rakyat dengan bibit unggul, sekaligus memperkuat kelembagaan perkaretan nasional dengan pembentukan Dewan Karet Indonesia.

- a. Memantau dan mengevaluasi perkembangan karet dunia dan Indonesia.
- b. Memantau dan mengevaluasi produksi dan pemasaran Karet Indonesia.
- c. Bersama Pemerintah mendorong pelaksanaan peremajaan tanaman karet rakyat Indonesia termasuk pengadaan bibit karet berkualitas.
- d. Bersama Pemerintah mempromosikan pengelolaan kebun karet rakyat yang ramah lingkungan.
- e. Meningkatkan daya saing produk-produk dari karet di pasar dunia.
- f. Bersama Pemerintah memperkuat kelembagaan petani karet untuk meningkatkan daya beli/ tawar petani melalui perbaikan mutu.
- g. Bersama Pemerintah mendorong dan mempercepat sertifikasi lahan karet milik petani dalam rangka memperkuat akses petani kepada Perbankan.
- h. Aktif berpartisipasi pada rapat-rapat Komisi Karet Indonesia dalam rangka perumusan bahan kebijakan Perkaretan Nasional dan pembentukan Dewan Karet Indonesia.

## **83. Kelapa Sawit**

Meningkatkan penerimaan devisa dan ketersediaan minyak goreng dengan memantau perkembangan ekspor cpo dan ketersediaan minyak goreng dalam negeri, antara lain dengan:

- a. Memantau dan mengevaluasi pasar minyak sawit / CPO dunia dan dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa negara dan ketersediaan Minyak goreng dalam negeri.
- b. Bersama Dewan Minyak Sawit Indonesia mendorong pembangunan industri hilir sawit yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai tambah sawit.
- c. Mendorong Dewan Minyak Sawit Indonesia untuk menerapkan sistim Standarisasi Nasional untuk produk-produk turunan minyak sawit.
- d. Mendorong peremajaan tanaman sawit rakyat dan perluasan kebun sawit rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan sawit untuk energi (biofuel).
- e. Mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan Kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) bagi minyak sawit (CPO) dalam rangka meningkatkan industri agro sawit dalam negeri, terutama kecukupan minyak goreng.

- f. Memantau dan mengevaluasi bibit sawit yang berkualitas untuk mencegah bibit palsu.
- g. Memantau dan mengevaluasi perizinan lahan dari Pemda setempat bagi perluasan kebun sawit bagi petani sawit.
- h. Bersama Pemerintah mendorong dan mempercepat sertifikasi lahan sawit milik petani dalam rangka memperkuat akses petani kepada Perbankan untuk memperoleh kredit murah.

#### **84. Jarak**

Mensosialisasikan tanaman jarak pagar sebagai bahan baku biodiesel terutama dari sudut pandang pengusaha Indonesia:

- a. Memantau dan mengevaluasi penanaman jarak pagar oleh masyarakat dan dipedesaan.
- b. Memantau pengadaan bibit unggul jarak pagar oleh Departemen Pertanian.
- c. Memantau dan mengevaluasi industri pengolahan biofuel/ biodiesel dengan menggunakan bahan jarak pagar .
- d. Mengadakan rapat-rapat Pokja Jarak tahun 2008.
- e. Berpartisipasi aktif dalam rapat, seminar, lokakarya, tentang jarak pagar dan biofuel.
- f. Membangun industri jarak pagar terpadu/ percontohan yang melibatkan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/ Kadin Indonesia, pengusaha dan Petani.
- g. Bersama Pemerintah mengusahakan kebijakan (UU tentang Bahan Bakar Nabati) harus ada regulasi yang khusus mengenai Bahan Bakar Nabati.
- h. Mendorong Pemerintah dan pihak Perbankan untuk membantu permodalan dengan bunga relatif rendah bagi petani jarak pagar dan pengusaha industri usaha kecil menengah biodiesel.

#### **85. Teh**

Peningkatan daya saing teh Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, sekaligus peningkatan konsumsi teh dalam negeri, melalui:

- a. Berpartisipasi dalam pembentukan Dewan Teh Indonesia dan akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya baik jangka pendek maupun jangka menengah selama tahun 2008.
- b. Mengupayakan realisasi peremajaan 30.000 ha tanaman teh rakyat diseluruh Indonesia.

#### **86. Etanol dari Singkong**

Pengembangan manfaat singkong sebagai bahan baku industri (bio-etanol, tapioka dsb nya), melalui:

- a. Pengembangan bibit unggul singkong, antara lain membangun proyek percontohan budi daya dengan menggunakan bibit-bibit unggul yang tersedia.
- b. Penyusunan data base persingkongan, mencakup bibit, sentra-sentra produksi, tingkat produksi nasional, daerah, tingkat konsumsi baik langsung maupun industri.

#### **87. Holtikultura**

Meningkatkan daya saing produk-produk holtikultura Indonesia dipasar domestik dan internasional melalui pemantauan dan pengevaluasian perkembangan produksi dan pemasaran holtikultura Indonesia yang masih punya banyak peluang:

- a. Memperkuat data dan informasi dasar tentang holtikultura di Indonesia, mencakup jenis, produksi, konsumsi, benih / bibit, pemasaran, pembiayaan dan kesejahteraan petani holtikultura.

- b. Mempromosikan peluang investasi di bidang holtikultura baik di hulu / pembibitan, on farm, dan industri hilir .
- c. Mempromosikan “ **Aku cinta produk buah dan sayur Indonesia**”.
- d. Bersama Pemerintah membuka perwakilan-perwakilan dagang bagi produk holtikultura di luar negeri.

#### **88. Mekanisasi Pertanian**

Merumuskan masukan kebijakan mekanisasi pertanian ke arah perkuatan payung hukum mekanisasi pertanian, antara lain melalui:

- a. Penyelesaian buku “Direktori Mekanisasi Pertanian”.
- b. Partisipasi dalam menyusun peraturan-peraturan tentang Mekanisasi Pertanian.

#### **89. Bioteknologi**

Pengembangan bioteknologi berorientasi pasar atau komersialisasi bioteknologi, antara lain dengan:

- a. Menginventarisasi permasalahan yang masing-masing timbul dari setiap Pokja serta merumuskan alternatif solusinya.
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan Komite Tetap Pengembangan Biotek Agroindustri kepada Pimpinan Kadin Indonesia.
- c. Membantu kerjasama dengan para peneliti dalam negeri.
- d. Memantau perkembangan bioteknologi dunia dan di Indonesia.
- e. Membuka peluang – peluang usaha industri bioteknologi yang memungkinkan menarik investor.
- f. Bersama Pemerintah dan Perguruan Tinggi mengupayakan produk-produk bioteknologi untuk komersial / industri lanjutan.

#### **90. WTO Pertanian**

Mempersiapkan data untuk menunjang kepentingan pertanian Indonesia di dalam perundingan-perundingan WTO Pertanian termasuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan persiapan menghadapi sidang-sidang WTO Internasional.

### **H. KELAUTAN**

#### **91. Pengembangan Industri Maritim**

Pengembangan industri maritim dan produk kelautan Indonesia, antara lain melalui:

- a. Pembinaan & Pengembangan Kualitas Pengusaha Industri Maritim Indonesia
- b. Sosialisasi dan Negosiasi agar terjadi Penciptaan Iklim Usaha Maritim yang Kondusif untuk Peningkatan Peran Strategis Industri Maritim guna Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Tujuan Ekspor
- c. Sosialisasi perlunya Kebijakan Maritim Nasional (lanjutan)

### **I. PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI**

#### **92. Roadmap Perdagangan**

Penyusunan Roadmap Perdagangan dengan mengadakan Rakor Perdagangan dan Distribusi Kadin Indonesia, yang sudah dimulai dengan penyelenggaraan pra-rakor sejak Desember 2007, direncanakan diselenggarakan sekitar bulan Mei 2008 dengan hasil berupa rumusan Roadmap Perdagangan.

#### **93. Sistem Distribusi Nasional**

- a. Monitoring pelaksanaan Sistem Distribusi Nasional agar berjalan secara efektif dan efisien.

- b. Kadin Indonesia melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat agar diperjelas insentif bagi pengusaha yang bergerak di sektor pertanian.

#### **94. Industri Jasa Logistik**

Keberadaan industri jasa logistik di Indonesia sebagai rantai distribusi dalam alur perdagangan masih belum ada kejelasan dan bahkan belum diatur didalam Perpres tentang DNI, sementara kegiatan logistik itu sendiri sudah eksis di Indonesia. Untuk itu akan dilakukan:

- a. Merumuskan pemahaman tentang industri logistik secara universal di lingkup dunia usaha, termasuk pandangan yang perlu disampaikan dalam kaitannya dengan DNI
- b. Mengusulkan pengaturan perusahaan *logistic service provider* (LSP)
- c. Mengembangkan Sistem Pusat Pergudangan dan Pusat Distribusi Logistik.

#### **95. Pasar Modern dan Pasar Tradisional**

Menyusun masukan untuk kebijakan penataan pasar modern dan pasar tradisional serta toko-toko serta kebijakan penataan dan perenovasian pasar tradisional agar bisa bersaing dalam rangka terwujudnya harmonisasi/kemitraan antara pasar tradisional dengan pasar modern.

#### **96. Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia**

Berpartisipasi dalam pengefektifan Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

#### **97. Pameran dan Misi Dagang**

- a. Mengaktifkan kerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan pameran internasional dan misi dagang ke luar negeri.
- b. Kadin Indonesia memberikan bantuan yang lebih nyata terhadap Kadin Daerah yang melaksanakan pameran-pameran dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi daerah yang bertujuan mendorong pengembangan usaha dan daya saing di daerah

#### **98. Kompetensi SDM**

Peningkatan Kompetensi SDM di bidang perdagangan dan distribusi, melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SDM di bidang Perdagangan dan Distribusi dengan basis kompetensi, bekerjasama dengan Kementerian KUKM, BNSP, Depdiknas, Depnakertrans dan Depdag dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian.

#### **99. Komunitas Daya Saing**

Meningkatkan daya saing bersama komunitas daya saing (Indonesia Competitiveness Community) dengan menyelenggarakan dialog nasional Peningkatan Daya Saing.

## **J. TRANSPORTASI**

#### **100. Peraturan Pelaksanaan UU Pelayaran**

Kajian dan usulan peraturan pelaksanaan RUU Pelayaran yang sudah disahkan DPR-RI pada tanggal 8 April 2008, khususnya mengenai peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagaimana diamanatkan dalam RUU tersebut.

#### **101. Perhubungan**

- a. Penyelenggaraan Rakornas Perhubungan, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2008 dengan TOR mengacu pada program kerja 2008.
- b. Diperlukan dukungan Kadin Indonesia dalam menindaklanjuti amanat Keputusan Menteri Perhubungan RI no. 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan

Pengusaha *Tally* di Pelabuhan. Peraturan tersebut memberikan kesempatan kepada Kadin untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan *Tallyman*. Untuk itu Kadin di seluruh Provinsi diharapkan mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

- c. Membantu dan memfasilitasi Kadin Daerah dalam menyediakan tenaga kerja melalui *outsourcing* yang kompetensinya dilakukan bersama dengan Kadin Daerah setempat.

## **K. TELEKOMUNIKASI**

### **102. Seminar Industri Kreatif**

Seminar tentang industri kreatif bekerjasama dengan Komite Tetap Informatika.

### **103. First Draft Konsep Kadin tentang Konvergensi**

Merelease first draft konsep Kadin tentang konvergensi bersama dengan Komite Tetap Informatika.

### **104. Creating Kadin Shortcode for Kadin Services**

Membantu Komite Tetap Informatika dalam meningkatkan layanan dan jasa via web dan sms.

### **105. Rakornas Telematika**

Rakornas Telematika, bekerjasama dengan Komite Tetap Informatika.

### **106. Telecommunication Conference**

Telecommunication Conference ke 2 bersama Dirjen Postel.

### **107. Penerbitan Outlook Industri**

Menerbitkan tinjauan (outlook) dan kinerja industri telekomunikasi secara berkala.

### **108. Position Paper**

Membuat position paper Kadin tentang liberalisasi sektor telekomunikasi.

### **109. Partisipasi dalam Pokja**

Melanjutkan partisipasi pada seluruh pokja di sektor telekomunikasi dan penyiaran yang telah ada.

## **L. INFORMATIKA**

### **110. Program Website / KISS**

Melanjutkan program website KISS (Kadin Integrated Information System), pengembangan dan manajemen data base.

### **111. Digital Archiving / E - Office**

Digital Archiving / e-office, untuk diterapkan dalam kegiatan Sekretariat Kadin Indonesia.

### **112. Rakornas Telematika**

Rakornas Telematika, bekerjasama dengan Komite Tetap Telekomunikasi, yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2008.

## **M. PROPERTI**

### **113. Pengembangan Prasarana**

Pengembangan konsistensi implementasi pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1999 dikalangan penyedia dan pengguna jasa konstruksi

### **114. Ekspor Jasa Konstruksi**

Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan kedutaan RI dinegara ASEAN serta perwakilan negara-negara ASEAN di Indonesia dalam rangka meningkatkan ekspor jasa konstruksi dalam rangka memperluas dan meningkatkan ekspor jasa konstruksi.

### **115. Peningkatan Daya Saing Kontraktor Nasional**

Memperjuangkan dukungan dari perbankan nasional maupun Lembaga-lembaga keuangan guna mendapatkan fasilitas pendanaan dengan suku bunga yang rendah/murah dalam rangka peningkatan daya daya saing kontraktor nasional di dalam dan luar negeri.

### **116. Kesetaraan Sertifikasi Kompetensi Profesi Jasa Konstruksi Nasional**

Mengupayakan kesetaraan sertifikasi kompetensi profesi jasa konstruksi nasional dengan pelaku yang sama di negara Asean dan Timur Tengah dengan mendorong LPJKN supaya menerapkan uji kompetensi secara internasional yang memenuhi standar internasional.

### **117. Regulasi Investasi Infrastruktur**

Mengkaji dan memberikan masukan pada pemerintah agar segera membenahi seluruh regulasi investasi infrastruktur di Indonesia, antara lain melakukan kajian draft metrix kebijakan infrastruktur, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia guna mendukung perekonomian Nasional.

### **118. Stimulus Pajak-Pajak Properti**

Memperjuangkan penurunan pajak-pajak property supaya investor tertarik bergerak di bidang properti.

### **119. Hak Kepemilikan atas Properti oleh Orang Asing**

Mengusulkan agar kepemilikan properti bagi orang asing dapat diperluas yaitu dengan memperpanjang hak pakai dan memberikan kemudahan bagi orang asing untuk mengakses KPR.

### **120. Peningkatan Profesionalisme Pengembang**

Melibatkan para pengembang di Indonesia pada forum Reaestat tingkat internasional dalam rangka membuka peluang investasi.

### **121. Penciptaan Peluang Investasi Properti**

Memperjuangkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau spesial Ekonomi Zone (SEZ) sebagai peluang investasi bagi pengembangan sector property dan pelurusan peran pengembang pada konteks untuk perumahan dan permukiman dan aturan Kasiba dan Lisiba.

### **122. Keringanan Biaya dan Pajak-pajak Perumahan dan Permukiman**

Penjajakan kemungkinan penurunan bea masuk material/peralatan untuk proyek-proyek perumahan dan mengupayakan tentang Pembebasan atas pengenaan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) untuk penjualan Rumah Sederhana Sehat ( RSH ) dengan harga maksimal Rp. 49 juta.

### **123. Bank Khusus Perumahan**

Mendorong Pemerintah agar segera dikeluarkan ketetapan keputusan untuk menjadikan Bank BTN sebagai Bank Perumahan.

### **124. Tabungan Perumahan Nasional**

Kadin bekerjasama dengan kantor Mempera dan DPP REI memfasilitasi terbentuknya program Tabungan Perumahan Nasional.

### **125. Prasarana Usaha**

Pengembangan iklim yang kondusif sektor prasarana usaha, untuk mendukung pertumbuhan investasi, kegiatan perdagangan, industri dan jasa melalui:

- a. Perbaikan (revisi) terhadap infrastruktur hukum antara lain:
- b. Menggolongkan usulan RPP tentang Kawasan Industri menjadi Peraturan Pemerintah
- c. Mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 1996 tentang tempat penimbunan berikat yang memberikan iklim usaha yang dapat bersaing di pasar internasional.
- d. Melakukan sosialisasi secara intensif undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Pelaksanaan antara lain PP Kawasan Industri, PP Kawasan Berikat, PP tentang Pertanahan dan undang-undang FTZ kepada dunia usaha nasional maupun internasional
- e. Melanjutkan pembentukan Pokja-pokja kawasan industri, kawasan berikat, FTZ, kawasan terpadu perumahan dan permukiman, agar penyelesaian permasalahan yang terkait dengan sektoral usaha dapat tertangani secara efisien dan efektif.
- f. Melakukan Studi Banding ke Negara-Negara Tetangga tentang Pengembangan Sarana Usaha, antara lain tentang Pengembangan Kawasan Industri, Kawasan Berikat, FTZ, Pertanahan dan Kawasan Terpadu Perumahan dan Permukiman

## **N. PARIWISATA**

### **126. Promosi Pariwisata**

- a. Mengantisipasi perkembangan pariwisata dan masalah aktual Tahun Kunjungan Indonesia, promosi pariwisata difokuskan pada perbaikan citra dan investasi industri pariwisata.
- b. Menyempurnakan kembali program kepariwisataan Indonesia tahun 2008 dengan memperhatikan potensi-potensi pariwisata daerah mengingat sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang banyak berkaitan dengan sektor lain.

## **O. LINGKUNGAN**

### **127. Sustainable Consumption and Production (SCP)**

Pengembangan Program Sustainable Consumption and Production (SCP) bersama Kantor Kementerian Lingkungan Hidup

### **128. Bisnis Lingkungan**

- a. Sosialisasi Bisnis Lingkungan
- b. Melanjutkan Program Trade & Environment dengan menyelenggarakan Austreat Three di Australia Barat

### **129. Promosi One Desa One Product (ODOP)**

### **130. Corporate Social Responsibilities**

- a. Memberikan CSR Village Award
- b. Menyelenggarakan Lokakarya Nasional CSR Desa, Implementasi UU No. 40/2007 Mengangkat Kompetensi Inti Daerah

## **D. MONETER DAN FISKAL**

### **131. Insentif dan Mitigasi Risiko Sektor Keuangan**

- a. Memberikan masukan kepada Komisi XI DPR dalam berbagai Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah tentang berbagai kebijakan untuk meningkatkan sektor ekonomi riil.
- b. Berpartisipasi sebagai pembicara dalam berbagai seminar/forum nasional untuk memberi masukan dalam meningkatkan pertumbuhan riil.
- c. Mengusahakan dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran maupun kebijakan (insentif dan proteksi).
- d. Melakukan *risk assessment* secara *tailor-made case by case* sehingga pembiayaan dapat lebih mudah dilakukan; sekaligus mengembangkan kebijakan mengantisipasi mitigasi risiko
- e. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai bentuk kelembagaan dan *scope of work* organisasi.

### **132. Stabilitas Sistem Keuangan**

Berpartisipasi aktif Dalam Forum Komunikasi Kadin – BI untuk mendorong terwujudnya Stabilitas Sistem Keuangan demi peningkatan pertumbuhan sektor riil.

### **133. Public Governance Sektor Keuangan**

Bekerjasama dengan berbagai universitas/lembaga riset untuk menyusun working papers terkait dengan kinerja sektor keuangan di Indonesia.

### **134. Pengembangan Fungsi Intermediasi Perbankan**

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan bagi masyarakat dunia usaha, dilakukan beberapa langkah berikut:

- a. Melakukan pembahasan dalam bentuk seminar/roundtable discussion dengan pihak Bank Indonesia membahas hal-hal/masalah-masalah perbankan yang dihadapi oleh dunia usaha dimana pokok bahasan sudah dihimpun oleh Tim FKKBI Internal Kadin untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi kelangsungan dan pengembangan dunia usaha pada umumnya serta sektor riil dan UMKM pada khususnya.
- b. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia khususnya dengan Direktorat Pusat Pendidikan dan studi Kebank-sentralan (PPSK) serta Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia maupun Direktorat International BI.

### **135. Pasar Modal sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif**

Sosialisasi pasar modal sebagai sumber pembiayaan alternatif, antara lain dengan melakukan Road-Show Pasar Modal, terutama ke daerah-daerah yang potensial.

### **136. Pembentukan Institute of Capital Market**

Pendirian Institute of Capital Market yang pertama di Jakarta ini sedang dalam tahap perintisan dan proses, dimana nantinya akan dikerjasamakan juga dengan

lembaga/institusi lain mempunyai reputasi baik agar dapat berkembang dengan pesat.

### **137. Penjaminan Surat-surat Berharga**

Memperjuangkan terus agar masalah penjaminan Surat-surat berharga ke pihak dunia perbankan dapat dilaksanakan bagi perusahaan-perusahaan publik, guna mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

## **Q. KETENAGAKERJAAN**

### **138. Tindak-lanjut Pembentukan Forum Bipartit Nasional**

Mencanangkan dan mengaktifkan Forum Bipartit Nasional (FBN) yang dicanangkan pada 21 Februari 2008 untuk membangun suasana kondusif dimaksud, setidaknya dibutuhkan empat kondisi yang saling terkait:

- a. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan ;
- b. Terciptanya kepastian hukum serta terlaksananya penegakan hukum ;
- c. Terciptanya rasa aman di masyarakat ;
- d. Kebijakan pemerintah yang konsisten sesuai dengan semangat reformasi dalam era globalisasi.

### **139. RPP Kompensasi PHK/Pesangon**

Mengagendakan Rakor jajaran DPP KADIN Indonesia untuk mensosialisasikan sikap KADIN Indonesia menyikapi kondisi ketenagakerjaan terkait isu-isu mutakhir hubungan industrial, khususnya membahas dan menyikapi RPP PESANGON konsep Depnakertrans.

### **140. International Labour Conference 97**

Aktif sebagai anggota delegasi Indonesia (DELRI) ke Sidang ILC ke 97 di Jenewa, 27 Mei s/d 13 Juni 2008 dengan agenda tetap membahas laporan global tindak lanjut Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak mendasar di tempat kerja yang difokuskan pada Kebebasan Berserikat dan Hak Berunding Bersama; serta agenda tambahan mengenai Promotion of Rural Employment; Skills for improved productivity, employment growth and development; dan The Strengthening the ILO's Capacity to assist its Members. Unsur pengusaha Delri akan berpartisipasi di 4 (empat) komite:

- a. Aplikasi Standard a.l akan membahas Kasus Indonesia mengenai tuduhan pelanggaran Kebebasan Berserikat berjumlah 8 Kasus Individu ;
- b. Promotion of Rural Employment ;
- c. Skills for Improved PEGD;
- d. The Strengthening the ILO's Capacity.

### **141. Sosialisasi Isu-Isu Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial**

Dalam upaya menyamakan persepsi dan membantu Para Pengurus jajaran Kadin Indonesia menyikapi masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial akan dilaksanakan penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan beserta Juklak dan Juknis terkait dalam bentuk Rakor yang difasilitasi oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang SDM dan Ketenagakerjaan dan Sekretariat Kadin Indonesia.

### **142. Tindak-lanjut MoU Program Siap Kerja Depdiknas-Kadin-Depnakertrans**

- a. Menindak lanjuti Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kadin Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Keterpaduan Program Siap Kerja dan Pemahaman Hubungan Industrial Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat, Mahasiswa dan Peserta Didik pada

Satuan Pendidikan Nonformal, antara lain pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesepakatan Bersama yang anggotanya terdiri dari pejabat di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pendidikan Nasional dan Kadin Indonesia.

- b. Mensinergikan potensi masing-masing pihak dalam rangka keterpaduan program siap kerja dan pemahaman hubungan industrial bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal sehingga terwujudnya tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia bagi lulusan sekolah menengah atau sederajat, mahasiswa dan peserta didik pada satuan pendidikan nonformal.

#### **143. Tindaklanjut MOU Perluasan Kesempatan Kerja Kadin Indonesia-BNP2TKI**

Menindak lanjuti Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Kadin Indonesia dengan BNP2TKI tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Negeri, antara lain pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur BNP2TKI dan Kadin Indonesia untuk menyelaraskan pelaksanaan program promosi TKI di Luar Negeri dalam rangka memperluas kesempatan kerja di pasar kerja Internasional, meningkatkan penempatan TKI di Luar Negeri dan mengurangi pengangguran.

#### **144. Melanjutkan Pembentukan BKSP di 14 Provinsi**

Melanjutkan pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) di 14 Provinsi Pilot Proyek. Fungsi dan tujuan BKSP adalah:

- a. Sebagai lembaga intermediasi yang dapat mengharmoniskan hubungan antara dunia industri dengan pemerintah dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi pekerja dan mengatasi pengangguran di daerah.
- b. Memberikan jawaban akan kebutuhan ditingkat propinsi dalam hal kepentingan masyarakat pekerja yang membutuhkan sertifikat kompetensi.
- c. Menjadi sentra informasi bagi masyarakat pekerja dan dunia usaha.

#### **145. Melanjutkan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)**

Menfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang akan dibentuk oleh asosiasi industri untuk:

- a. Menyusun dan mengembangkan standar kompetensi profesi
- b. Menyusun dan mengembangkan materi uji kompetensi
- c. Mengembangkan Sistem Informasi Standard Kompetensi
- d. Mengembangkan dan membina SDM melalui Sertifikasi Kompetensi
- e. Membina Lembaga-lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berfungsi sebagai tempat Uji Kompetensi melalui Akreditasi
- f. Mengembangkan data base SDM pemegang Sertifikasi Kompetensi sebagai rujukan untuk keperluan dalam negeri dan luar negeri.

#### **146. Mengadakan Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Pelatihan**

Melaksanakan Pilot Project Pelatihan Welder bagi para pemuda penganggur (berjumlah 100 orang) bekerjasama antara Kadin Indonesia – Lembaga Pelatihan Welding Yayasan Binawan bertempat di Pusdiklat Binawan Cianjur. Tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan pengiriman TKI ke Korea dan Timur Tengah sebagai realisasi Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kadin Indonesia dengan BNP2TKI.

#### **147. Kompetensi SDM Industri SPA**

Menyelenggarakan seminar dengan topik "Meningkatkan Kompetensi SDM Industri Spa" bekerjasama dengan BNSP, BRI, Indonesia Spa Profesional Association (Indspa)

dan Indonesian Master Association (IMA) dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang profesional, kompeten dan berdaya saing, baik di pasar kerja domestik dan internasional.

#### **148. Pengembangan Pemuda Wirausahawan**

Meningkatkan kontribusi Kadin Indonesia dalam pengembangan kewirausahaan dengan mengembangkan program pelatihan kewirausahaan dengan instansi/organisasi terkait; sosialisasi tentang manajemen kewirausahaan kepada UKM, dan membentuk kelembagaan nasional pengembangan kewirausahaan pemuda.

#### **149. Pemanfaatan Tenaga PHK Terampil**

Meningkatkan kontribusi Kadin Indonesia dalam pemanfaatan tenaga PHK terampil dengan melaksanakan pengembangan program penempatan/pemanfaatan tenaga PHK terampil sebagai tenaga pendamping di UKM; serta mengembangkan usaha mandiri untuk tenaga PHK terampil melalui kerjasama dengan instansi terkait.

#### **150. Mewujudkan SKB Kadin Indonesia dengan Direktorat Jenderal PLS Depdiknas**

Untuk menindaklanjuti SKB Kadin Indonesia dengan Ditjen Pendidikan Luar sekolah Depdiknas, direncanakan program-program sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Teknis Kerjasama Ditjen PLS dengan Kadin Indonesia yang terdiri dari perwakilan pihak Depdiknas dan Kadin Indonesia.
- b. Mengadakan hubungan kerjasama dengan perusahaan yang bernaung dibawah Kadin Indonesia dalam rangka penempatan para peserta kursus dan pelatihan untuk melakukan Praktek Kerja Industri (Prakerin).
- c. Menyusun Pedoman Umum maupun Pedoman Khusus yang mengatur rincian program dan mekanisme kerja dan hal-hal lain yang dipandang perlu bersama pihak Ditjen PLS Depdiknas.
- d. Menyiapkan Data Informasi lowongan kerja dan peluang usaha mandiri yang terbuka di seluruh perusahaan yang bernaung dibawah Kadin Indonesia yang diprioritaskan bagi lulusan kursus dan pelatihan.
- e. Membantu kegiatan Lembaga Pendidikan & Pelatihan Kadin DKI Jakarta dalam pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Jasa Pelabuhan bersama pihak Ditjen PLS Depdiknas.
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka mewujudkan SKB Kadin Indonesia dengan Direktorat Jenderal PLS Depdiknas.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:

- Mewujudkan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bermutu, sesuai dengan standar kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dalam skala nasional maupun internasional.
- Mendayagunakan lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam rangka mengisi lowongan pasar kerja dan peluang usaha mandiri yang tersedia pada Badan Usaha/ Industri yang terhimpun dalam wadah Kadin Indonesia.
- Memberikan kesempatan dalam pemanfaatan fasilitas Badan Usaha Industri yang bernaung dalam wadah Kadin Indonesia untuk kegiatan praktek kerja industri sesuai program Kursus dan Pelatihan.

## **R. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Program Bidang UKM 2008/9 merupakan kelanjutan dan pendalaman dari program 2004-2007. Model-model yang sudah dirumuskan dan dilaksanakan akan dirangkum

menjadi suatu pedoman pengembangan UMKM terpadu. Model-model ini diberikan terbuka untuk bisa diaplikasikan oleh setiap jajaran Kadin sesuai dengan kondisi wilayah kerja atau sektor masing-masing. Pembahasan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tetap dilanjutkan.

Program Bidang UKM merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan awal kepengurusan 2004-2009, yaitu:

**151. Visi**

Tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah yang tangguh berdasarkan sumber daya sendiri akan memperkuat struktur dan daya tahan perekonomian nasional.

**152. Misi**

Mengembangkan akses usaha kecil dan menengah pada faktor-faktor produksi dan pada pasar.

**153. Kebijakan Proyek Skala UMKM**

Mendukung pemerintah dalam usaha mengembangkan proyek skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

**154. Kebijakan Pengembangan Sektor Riil melalui Bisnis Real Time**

Mendorong adanya kebijakan yang pro sektor riil melalui pendekatan bisnis *real time* bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

**155. Revitalisasi Koperasi**

Mengupayakan adanya kebijakan untuk merevitalisasi unit usaha koperasi untuk mengembangkan koperasi di Indonesia.

**156. Pembiayaan yang lebih Kondusif untuk UKM**

- a. Dialog kebijakan dan sosialisasi Pembiayaan yang lebih Kondusif untuk UKM sebagai upaya adanya kebijakan dan regulasi pengembangan kredit perbankan; pengembangan sumber pembiayaan alternatif; berkembangnya jasa penjaminan kredit; dan tumbuhnya jasa modal ventura
- b. Mengusulkan kepada pemerintah agar menyediakan dana kredit mikro dengan syarat yang mudah dan memperkuat lembaga penjamin kredit.

**157. Sumber Modal Alternatif**

Dialog kebijakan dan sosialisasi pemanfaatan sumber modal alternatif, seperti obligasi, trustee funds dan dana pensiun oleh UKM.

**158. Desain Model Pusat Informasi Komoditi**

Sosialisasi dan penerbitan rancangan atau desain model pusat informasi komoditi (commodity exchange) sebagai pusat informasi komoditi sebagai prasarana dan sarana commodity exchange.

**159. Database Industri Basis Pengembangan Pasar**

Melanjutkan pembangunan database industri UKM sebagai suatu basis utama pengembangan pasar produk UKM.

**160. Desain UKM Estate**

Sosialisasi dan penerbitan desain UKM Estate sebagai suatu model alternatif bagi jajaran Kadin dalam membina industri dan pasar produk UKM.

**161. Pengembangan OVOP**

Sosialisasi program One Village One Product (OVOP) kepada jajaran Kadin.

**162. Diseminasi Informasi dan Penyuluhan Manajemen**

Penerbitan tabloid UKM sebagai sarana diseminasi informasi teknologi, manajemen dan pasar sebagai upaya pengembangan apresiasi yang lebih baik dalam pengelolaan usaha pada UKM sekaligus membukakan wawasan diversifikasi usaha bagi pengusaha.

**163. Modeling Jaringan Produsen dan Pasar**

Sosialisasi dan penerbitan desain jaringan produsen dan pasar yang bisa diterapkan oleh jajaran Kadin sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

**164. Pemanfaatan Situs-Situs Internet untuk Perluasan Jaringan Usaha**

Sosialisasi penggunaan situs-situs internet sebagai wahana perluasan jaringan usaha dalam dan luar negeri.

**165. Penggunaan Software Legal oleh UKM**

Sosialisasi IGOS Nusantara sebagai software legal berbiaya rendah. Tahap awal dilakukan dengan mendistribusikan softcopy informasi dalam IGOS Office kepada jajaran Kadin.

## **S. KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL**

**166. Kerjasama Kawasan Regional**

Membuka kembali kerjasama kawasan dalam IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapore - Growth Triangle*) seperti halnya IMT-GT (*Indonesia, Malaysia, Thailand - Growth Triangle*).

**167. Pemantapan dan Peningkatan Fungsi**

Peningkatan kinerja para pengurus Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional.

**168. Perbaikan Hubungan Kerja**

Perbaikan hubungan kerja dengan /antar Komite-komite Bilateral/Multilateral

**169. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Peningkatan koordinasi dan penyertaan dari asosiasi yang bergiat dalam aspek ekonomi/perdagangan internasional.

**170. Pemantapan Hubungan Kerja Dengan Kabinet**

Pemantapan dan peningkatan hubungan kerja Kabinet (Presiden, Wakil Presiden dan para menteri bidang perekonomian), khususnya dalam misi kerjasama ekonomi internasional.

**171. Advokasi dan Dukungan Perundingan Internasional**

Pelaksanaan advokasi bagi kepentingan anggota sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam perundingan internasional, seperti dalam forum WTO, multilateral, bilateral dan regional.

## **172. Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Birokrasi**

Pemantapan dan peningkatan hubungan kerja dengan jajaran birokrasi dalam negeri (departemen terkait) dan luar negeri (kedutaan besar) khususnya penanganan masalah ekonomi dan perdagangan internasional.

## **173. Hubungan Dengan Lembaga Bilateral**

Pemantapan dan peningkatan hubungan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri negara-negara sahabat (hubungan tradisional), kantor-kantor perwakilan dagang di Indonesiaserta lembaga ekonomi perdagangan lainnya, khususnya dalam rangka promosi perdagangan dan investasi.

## **174. Hubungan Dengan Lembaga Multilateral**

Pemantapan dan peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga multilateral seperti ASEAN-CCI, ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC), APEC Business (ABAC), Confederation of Asia Pasific Chamber of Commerce and Industry (CACCI), International Chamber of Commerce (ICC), termasuk berperan aktif dalam for a/ event yang diselenggarakan.

## **175. Misi Dagang**

Dorongan dan memfasilitasi terhadap penyelenggaraan misi dagang dan promosi investasi ke luar negeri guna peningkatan kinerja ekspor Indonesia.

## **176. Afrika Bagian Selatan**

### **a. Pendalaman dan pengembangan organisasi**

Membentuk 8 (delapan) kelompok kerja (Pokja) terdiri dari (i) manufaktur, (ii) agribisnis, (iii) perdagangan, (iv) keuangan dan jasa perbankan, (v) usaha kecil dan menengah, (vi) pariwisata, (vii) rekrutmen tenaga SDM terampil (skilled labor) dan (viii) oil, gas dan mineral.

### **b. Pembentukan Sekretariat Eksekutif**

Melaksanakan kegiatan sehari-hari secara professional baik yang menyangkut kegiatan office work maupun realisasi fungsi kegiatan dan sasaran Kadin Komite Afrika Bagian Selatan dan Forum G-15.

### **c. Fund risng (pengumpulan dana organisasi)**

- Pengumpulan dana untuk melaksanakan organisasi secara profesional dan tepat sasaran disertai manajemen keuangan yang transparan, terencana serta diaudit secara berkala.
- Sumber dana diusahakan dari donatur (Dewan Pembina, Dewan Pengurus) maupun sumber dana lain yang tidak mengikat seperti kegiatan bisnis yang mempunyai nilai tambah (keuntungan) yang sebagian untuk operasional kegiatan organisasi.

### **d. Hubungan dengan institusi dalam dan luar negeri serta asosiasi**

- Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Dit Afrika Deplu
- Kerjasama dengan Dit. Afrika Deplu dilaksanakan sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama Kadin Indonesia dengan Departemen Luar Negeri yang ditandatangani 25 Maret 2007.
- Lingkup kerjasama meliputi pertukaran data dan informasi, menyelenggarakan promosi dagang dan informasi serta memposisikan perwakilan RI sebagai "seller".
- Kerjasama dengan Institusi Luar Negeri (misal Depdag dll)
- Pertemuan dengan 10 Duta Besar negara-negara Afrika dalam pembentukan African Business Forum.

- Direncanakan terlaksana pada Februari 2008.
- Perlu persiapan melalui koordinasi dengan Dubes Afrika Selatan di Jakarta (direncanakan pertemuan minggu III Januari 2008).
- Penyusunan Joint Trade Council (JTC) Indonesia Afrika Selatan ke-II di Jakarta
- Penandatanganan JTC I telah dilaksanakan di Afsel (2006) namun belum ada perkembangan.
- JTC II diharapkan dapat dilakukan di Jakarta dengan sasaran kegiatan strategis seperti pemberdayaan UKM dalam pemasaran produk Indonesia ke Afrika Selatan.

**e. Hubungan dengan Asosiasi (Sosialisasi Peluang Bisnis)**

Sosialisasi dengan Asosiasi, gabungan perusahaan dan forum bisnis melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Disusun program sosialisasi dengan 2 (dua) alternatif :
  - Mendatangi forum bisnis tersebut
  - Mengundang pengurus asosiasi gabungan dan forum bisnis
- Untuk kegiatan sosialisasi disusun Directory Peluang Pemasaran Ekspor Produk Indonesia
- Kemungkinan pelayanan Program Trade Financing Facilities yang diberikan oleh bank komersial.

**f. Menciptakan Kegiatan Bisnis Dengan Sasaran Mendapatkan Nilai Tambah Untuk mendukung Operasional Organisasi**

- Komite membentuk Kelompok Kerja yang menangani kegiatan bisnis.
- Nilai tambah (keuntungan) yang diperoleh sebagian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi.
- Produk yang mempunyai peluang untuk pengembangan kegiatan bisnis dibagi menjadi 8 (delapan) kelompok yaitu (1) industri manufaktur, (2) agribisnis (termasuk perikanan kehutanan), (3) kegiatan perdagangan, (4) keuangan dan jasa perbankan, (5) produk-produk usaha kecil dan menengah, (6) kegiatan pariwisata, (7) rekrutmen tenaga SDM terampil dan (8) investasi/perdagangan minyak, gas dan mineral.

**177. Bangladesh**

- Akan lebih bergiat untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan Investasi kedua negara
- Penyelengaran Bangladesh di Jakarta
- Pengirimam misi dagang ke Bangladesh

**178. Jepang**

- Peningkatan hubungan dengan Kadin dan Asosiasi khususnya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Jepang
- Peningkatan Hubungan Kerja dengan jajaran birokrasi dalam negeri (departemen terkait), luar negeri (Kedubes RI di Jepang)
- Pemantapan/peningkatan hubungan kerja dengan Kedubes Jepang di Jakarta, Jetro, Jica dan Japan Club
- Peningkatan hubungan kerja dengan Nippon Keidanren, Kankairen, Japan Chamber of Commerce and Industry
- Pendekatan dengan jajaran birokrasi Jepang yang terakit, agar mendorong pengusaha Jepang untuk meningkatkan investasinya di Indonesia

**179. Malaysia**

**a. Joint Trade and Investment Committee (JTIC)**

Sebagai realisasi nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang mencakup bidang hukum, peraturan kebijakan nasional tiap negara yang masing-masing negara kedepan dengan dasar persamaan dan asas saling menguntungkan. Pelaksanaan JTIC Indonesia semula dijadwalkan tanggal 28-29 Februari 2008 di Kota, karena adanya Pemilu Malaysia acara diundur sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

**b. Penyelenggaraan "Trend Indonesia 2008"**

Akan diselenggarakan "Trend Indonesia 2008" sebagai realisasi penyelenggaraan "Trend Indonesia 2007" yang direncanakan bulan November 2008 dan tempatnya akan ditentukan lebih lanjut.

**c. Kunjungan ke Kota Kuching dan Kinibalu**

Promosi perdagangan dan Investasi ke Kota Kuching dan Kinibalu yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2008.

**180. Rusia dan Commonwealth of Independent States (CIS)**

- a. Senantiasa Berkoordinasi dengan Kadin Indonesia, Instansi Pemerintah terkait, Kedubes Federasi Rusia & CIS di Jakarta, Kedubes RI dan Kadin-Kadin di Federasi Rusia & CIS
- b. Memantau pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama (MoU) yang telah ditandatangani pada acara Business Forum Indonesia-Russia tanggal 6 September 2007
- c. Mendorong/memfasilitasi usaha kunjungan misi dagang dan investasi dari kedua negara

**181. Timur Tengah dan OKI**

**a. Jangka pendek**

- Merintis, membuka & mengembangkan hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional secara bilateral antara Indonesia dengan masing-masing negara Timur-Tengah dan OKI.
- Melakukan inventarisasi atas MOU yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dan OKI dan melakukan follow up atas kesepakatan – kesepakatan yang ada di dalam meningkatkan hubungan dagang dan melakukan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha Indonesia.
- Melakukan pertemuan secara periodik dalam bentuk "Lunch Gathering" antara pengusaha-pengusaha Indonesia dengan duta besar negara-negara Timur Tengah dan OKI dengan mengundang pembicara-pembicara yang mempunyai nilai tambah di dalam meningkatkan hubungan dagang Internasional.
- Menjadi tuan rumah bagi misi-misi dagang skala kecil dari negara-negara Timur Tengah dan OKI.
- Membangun data base pengusaha-pengusaha Indonesia yang mempunyai hubungan dagang dengan negara-negara Timur Tengah dan OKI.
- Memonitor kegiatan Business Council yang telah dibentuk, dimana saat ini baru dibentuk Business Council Indonesia – Turki.
- Berusaha memfasilitasi maupun menjembatani informasi ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak pengusaha Indonesia di dalam hubungan dagangnya dengan negara-negara Timur Tengah dan OKI.
- Bekerjasama dengan Badan-Badan Pemerintah di dalam program butir 1 diatas.
- Membuat Trade Directory Kadin Komite Timur-Tengah dan OKI

**b. Jangka panjang**

- Mengirim misi dagang ke negara-negara Timur Tengah dan OKI, terutama di dalam usaha mengenalkan produk-produk hasil buatan Indonesia.

- Mengorganisir pameran dagang produk-produk Indonesia di negara-negara Timur Tengah dan OKI.
- Membantu mengembangkan pariwisata Indonesia pada kegiatan – kegiatan di atas.
- Memberdayakan pengusaha-pengusaha UKM untuk dapat memperoleh peluang ekspor ke negara-negara Timur Tengah dan OKI.
- Mengikhtiarkan agar pengusaha-pengusaha Timur Tengah – OKI berminat untuk melakukan investasi ke Indonesia dan berusaha menjadi intermediary di dalam usaha ini.
- Merintis pembentukan Business Council pada negara-negara yang berpotensi di dalam peningkatan hubungan dagang bilateral.
- Secara periodik membuat bulletin yang menginformasikan seluruh kegiatan di dalam peningkatan hubungan dagang.
- Bekerjasama dengan unit-unit terkait berusaha meningkatkan keahlian sumberdaya manusia yang akan dikirim ke negara-negara Timur Tengah dan OKI.

## **T. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ETIKA BISNIS**

### **182. Pengembangan CSR**

- a. Terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kadin turut berpartisipasi dalam dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*
- b. Mendorong agar dibentuk Kelompok Kerja CSR yang menjalankan programnya hingga ke daerah.

### **183. Training for Trainers (ToT) GCG**

- a. Mendorong Kadinda Mengikuti ToT (Training for Trainers) GCG dengan Harapan Dapat Melakukan Kegiatan Konsultasi Didaerahnya
- b. Membangun klinik konsultasi percontohan di 5 Kadinda

### **184. Penelitian Kebijakan GCG**

- a. Kerjasama penelitian mengenai GCG dengan lembaga perguruan tinggi
- b. White paper on governance, kerjasama dengan ISEI dan Komite Nasional Kebijakan Governance

### **185. Pelatihan, Forum Diskusi dan Sosialisasi GCG**

- a. Melakukan seminar internasional mengenai GCG berkerjasama dengan Komnas Kebijakan Governance
- b. Membuat materi sosialisasi GCG secara populer ( komik, iklan layanan masyarakat, dialog di media)

### **186. Advokasi Kebijakan GCG**

- a. Mengadvokasi Penyelenggara Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) melaksanakan asas-asas Good Public Governance
- b. Mendorong dunia usaha untuk melaksanakan GCG
- c. Mengawal pembentukan dan sebagai Tim Kecil Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (program lanjutan Tahun 2007).

### **187. Buku Panduan , Modul dan Kisah Sukses Implementasi GCG**

Mempersiapkan bahan dan melakukan kegiatan sosialisasi GCG bagi anggota Kadin maupun perusahaan-perusahaan dalam rangka mewujudkan iklim berusaha yang sehat.

**188. Survey Penerapan *Code of Conduct* pada Asosiasi Usaha di Indonesia**

Melakukan Questionare kepada anggota-anggota dari Asosiasi Anggota Kadin di Indonesia tentang kegiatan usaha serta etika berbisnis yang baik dan benar.

**189. Seminar Etika Bisnis (kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta)**

Mengadakan seminar tentang kegiatan usaha serta etika dalam melakukan bisnis yang sehat, seperti seminar yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bekerjasama dengan Center for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL) yang diselenggarakan pada 29 Januari 2008 di Hotel Gran Melia Jakarta.

**190. Sosialisasi Penerapan Etika Bisnis**

Sosialisasi penerapan etika bisnis baru ditahap awal pelaksanaan dengan membuat draf awal himbuan kepada para asosiasi untuk memiliki pedoman perilaku yang akan menjadi pedoman di dalam melaksanakan etika bisnis.

- a. Mendorong Asosiasi mempunyai Pedoman Perilaku ( Code of Conduct )
- b. Memantau Pelaksanaan *Code of Conduct* di Asosiasi

**191. Reward & Punishment**

Mengetahui reward & punishment di asosiasi baru dilakukan dengan membuat draf surat yang akan dikirim ke asosiasi dan diharapkan akan memperoleh keterangan mengenai reward & punishment di dalam asosiasi.

**192. Seminar Persaingan Usaha yang Sehat bagi Pelaku Bisnis.**

Bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan melaksanakan seminar "UU Persaingan Usaha". Hal ini dilakukan pembicaraan antara Bapak Gema Taruna Maha dengan Mohamad Iqbal untuk persiapannya.

**193. Sosialisasi Persaingan Usaha yang Sehat bagi Pelaku Bisnis Melalui Penerbitan Buku/Leaflet.**

Penerbitan bahan-bahan tentang persaingan usaha masih dalam tahap pengumpulan data-data. Dan diharapkan pada tahun ini akan selesai penyusunan bahan-bahan persaingan usaha sehingga kemudian dapat di buat seminar ataupun workshop dengan mengundang para pelaku bisnis.

- a. Menerbitkan bahan-bahan tentang persaingan usaha yang sehat.
- b. Mengadakan diskusi/seminar/workshop tentang persaingan usaha yang sehat bagi para pelaku bisnis.
- c. Memberikan " Fair Competition Award" bagi para pelaku bisnis yang kegiatan usahanya mendukung persaingan usaha yang sehat.

**194. Perumusan Kebijakan Persaingan Usaha yang Sehat**

- a. Melakukan pengkajian yang menyangkut kebijakan persaingan usaha yang sehat di beberapa sektor ekonomi.
- b. Proaktif dalam penyusunan kebijakan persaingan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah
- c. Proses pengkajian menyangkut kebijakan persaingan usaha masih dalam tahap pengumpulan data. Pengumpulan data-data ini diharapkan dapat memberikan hasil

yang kongkrit mengenai berbagai permasalahan-permasalahan menyangkut persaingan usaha sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat.

#### **195. Pengembangan Pranata Usaha**

- a. Seminar/Dialog Pranata Usaha yang Kondusif bagi Pengembangan Dunia Usaha di Indonesia
- b. Penerbitan Buku Pranata Usaha yang Kondusif bagi Pengembangan Dunia Usaha di Indonesia

#### **196. Advokasi Kepranataan Usaha**

Advokasi kepranataan usaha melakukan pengumpulan data-data mengenai perda-perda yang sangat mengganggu dalam melaksanakan investasi di daerah. Diharapkan dengan dilakukan penghapusan perda-perda tersebut dapat menarik para penanam modal untuk melakukan investasi di Indonesia.

- a. Mendukung Komite Tetap lain dalam melakukan advokasi.
- b. Mendukung Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam advokasi perda yang diperlukan.

#### **197. Capacity Building Layanan Hukum**

Pembentukan Klinik Pelayanan Hukum Bisnis Kadin Indonesia sebagai upaya mengembangkan capacity building layanan hukum bekerjasama dengan DIHK untuk saat ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya penandatanganan tahap kedua kerjasama antara Kadin Indonesia dengan DIHK. Diharapkan setelah penandatanganan program capacity building dapat segera dilaksanakan.

#### **198. Penciptaan Forum Network**

Penciptaan forum network baru dalam tahap awal yaitu pengumpulan data-data organisasi yang dapat diajak bekerja sama untuk mencapai kesamaan persepsi mengenai kepranataan usaha dan diharapkan pada tahun ini akan mulai pembicaraan mengenai penciptaan forum network.

- a. Menyelenggarakan forum network kepranataan usaha.
- b. Membangun kesamaan persepsi dan adanya jaringan kepranataan usaha yang efektif bagi dunia usaha.

### **U. PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

#### **199. Road-Map Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia 2015**

Pertemuan Kemitraan Pemerintah dan Pengusaha Kawasan Timur Indonesia, dengan tema Pembangkitan dan Keberdayaan Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia, Refleksi dan Perspektif Bagi Multi-Stakeholder yang bertujuan untuk menghasilkan Roadmap-Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia 2015. Kegiatan Roadmap ini bertujuan untuk:

- a. Meletakkan kembali infrastruktur prioritas yang signifikan dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
- b. Menggali sumber-sumber keuangan dengan memperluas jaringan bisnis keuangan antara pemerintah-pemerintah; pemerintah-bisnis dan bisnis-bisnis.
- c. Mereformasi perda-perda yang tidak pro-ekonomi.
- d. Mengembangkan sumberdaya manusia secara kualitatif dan kuantitatif sebagai pelaku bisnis melalui "spirit kewirausahaan", untuk menemukan kekuatan diri dan mengasah profesionalisme, membangun *attitude* yang positif, melatih sikap yang proaktif, kreatif dan berinisiatif, serta mengembangkan komunikasi bisnis yang cerdas dalam membangkitkan sikap dan jiwa *entrepreneurship*.

## **200. Temu Usaha Kelapa Sawit Indonesia**

Mengadakan Temu Usaha Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah guna mengidentifikasi permasalahan dan perumusan solusi dalam pengembangan kemajuan agroindustri sawit Indonesia. Secara kelompok besar, permasalahan utama yang perlu diperhatikan serius adalah: i. tata ruang; ii. infrastruktur; iii. industri hilir dan downstream; iv. isu lingkungan hidup; dan v. kebijakan-kebijakan yang mendukung. Melalui temu usaha dapat dirumuskan:

- a. paket kebijakan masalah peningkatan nilai tambah komoditas sawit, mulai dari kebijakan tata ruang, infrastruktur, industri hilir dan downstream, serta isu lingkungan hidup.
- b. langkah-langkah teknis dalam mewujudkan pengembangan agroindustri sawit Indonesia.
- c. paket kelembagaan untuk percepatan pelaksanaan kebijakan dan langkah teknis pengembangan agroindustri sawit, terutama aspek kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (*Public, Society, Private Partnership- PSPP*).

## IV

# PENGUATAN ORGANISASI

Untuk pelaksanaan semua kegiatan, rencana kerja dan program serta langkah-langkah strategis dan taktis lainnya, diperlukan peningkatan penguatan organisasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

### **201. Website Kadin**

Mengembangkan Website Kadin, dengan Penambahan Satu Slot untuk pertukaran peluang bisnis bagi anggota, khususnya, dan dunia usaha umumnya. Melalui website disajikan:

- a. Menyusun *database* secara on line yang berisi daftar investor dalam negeri dan luar negeri untuk disebar ke seluruh Kadin Daerah.
- b. Mengembangkan *business network* antar Kadin seluruh Indonesia
- c. Mengembangkan sistem informasi manajemen data base anggota Kadin
- b. Menginformasikan jenis-jenis layanan Kadin bagi anggota dan reduksi biaya yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengguna yang bukan anggota Kadin.

### **202. Workshop Direktur Eksekutif**

Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi akan mengikutsertakan juga Direktur Eksekutif Asosiasi/Himpunan, akan membahas materi-materi yang terkait dengan perkuatan sekretariat Kadin baik dari sisi SDM dan layanan-layanannya. Direncanakan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2008.

### **203. Program Rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia**

Sebagai upaya melihat sejauh mana peran dan fungsi Kadin Provinsi dan Asosiasi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No 1/1987. Pemenang program rating dapat dijadikan sebagai "best practise" oleh Kadin Provinsi dan Asosiasi lainnya. Selain itu dapat menjadi masukan yang penting bagi Kadin Indonesia untuk merumuskan program pembinaan dan perkuatan organisasi dimasa mendatang. Rating dilaksanakan setiap tahun dan Rating tahun 2008 wajib bagi Kadin Provinsi.

### **204. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi**

Untuk tahun 2008 ada 3 (tiga) hal yang akan dilakukan sebagai rangkaian program yaitu:

- a. Surveillance audit bagi BSAN, BSAAP dan BSAP yang telah diakreditasi dengan tujuan antara lain:
  - Persyaratan perpanjangan akreditasi yang habis pada tanggal 28 Februari 2008
  - Pembinaan dan penyerapan aspirasi asosiasi
- b. Akreditasi baru bagi Asosiasi Tingkat Nasional yang mengajukan aplikasi.
- c. Penyempurnaan aturan lebih lanjut yang akan diterapkan pada tahun 2009.
- d. Diharapkan BARKI dapat diaktifkan kembali.

### **205. Peningkatan Anggota**

- a. Pembentukan Pusat Pelayanan dan Informasi
- b. Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota dan Peraturan Organisasi (PO) lainnya

Menyelenggarakan sosialisasi Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota dan PO lainnya kepada seluruh jajaran Kadin. Untuk Kadin Provinsi dan Asosiasi yang telah terakreditasi sosialisasi dilaksanakan pada kesempatan

kunjungan kerja oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Sedangkan untuk sosialisasi secara nasional dilaksanakan pada Rakornas Bidang Organisasi 2008 atau event lainnya yang dijadwalkan secara khusus.

- c. Kampanye Keanggotaan
  - Kampanye melalui event-event Kadin, media elektronik dan lain-lain.
  - Peningkatan anggota melalui penyebaran flyer dan lainnya.
  - Membuat petunjuk sistem keanggotaan agar Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota pro aktif dalam mendaftar anggota.
  - Pemuatan info anggota Kadin pada majalah info Kadin dan website.
- d. Melanjutkan Pembentukan Badan/Lembaga Advokasi Hukum Kadin Indonesia  
Pembentukan Badan/Lembaga Advokasi Hukum yang bertujuan untuk memberikan pelayanan/advokasi hukum bagi para anggota baik yang berkaitan dengan masalah hukum bisnis/corporate maupun litigasi/litigation (perdata & pidana).
- e. Layanan Perjalanan Kerjasama Kadin – Garuda Indonesia  
Untuk tahun 2008 akan ditingkatkan kemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak perbankan, perhotelan dan lain-lain. Selain itu, kepemilikan Kadin Card yang semula hanya terbatas pada Pengurus Kadin akan ditingkatkan untuk anggota Kadin

## **206. Pelaksanaan sistim layanan C/O secara nasional**

- a. Sistim layanan C/O secara Nasional ditetapkan sebagai berikut :
  - Kadin Provinsi yang dapat menerbitkan SKA adalah Kadin yang telah dikukuhkan ("diakreditasi") oleh Kadin Indonesia sebagai Kadin yang memenuhi kriteria sebagai penerbit CO yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia dengan memperhatikan potensi ekspor dari wilayahnya.
  - Kadin Kabupaten/Kota yang dapat menerbitkan SKA adalah Kadin yang telah dikukuhkan ("diakreditasi") oleh Kadin Indonesia sebagai Kadin yang memenuhi kriteria sebagai penerbit COO yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia dengan memperhatikan potensi ekspor dari wilayahnya dan diperlukan rekomendasi oleh Kadin Provinsi yang bersangkutan.
  - Jangka waktu berlakunya akreditasi selama 2 (dua) tahun atau sesuai dengan hasil surveilliance yang dilakukan secara periodik atau sesuai keperluan. Masa transisi Kadin Timur Tengah ditetapkan 1 tahun dan setelah itu tidak boleh menerbitkan CO.
  - Kriteria dan tatacara akreditasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Rapimnas Kadin 2008.
  - Menugaskan Kadin Indonesia untuk melakukan upaya pendekatan kepada Pemerintah supaya sistim CO Kadin mendapatkan pengakuan dari Pemerintah.
  - Untuk keseragaman penerbitan SKA oleh jajaran Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, Kadin Indonesia harus menyusun dan menetapkan kriteria, sistem, prosedur, dan tarifnya.
  - Form-Form SKA diterbitkan oleh Kadin Indonesia dan didistribusikan berdasarkan permintaan Kadin Provinsi yang terakreditasi dengan penggantian biaya cetak.
  - Tarif penerbitan SKA oleh Kadin terakreditasi seragam di seluruh Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Ketentuan dasar penarifan adalah sebagai berikut:
    - SKA bagi perusahaan Non-Anggota Kadin dikenakan biaya 100% tarif;
    - SKA bagi perusahaan Anggota Kadin dikenakan biaya 50% tarif.
- b. Alokasi penggunaan dana dari setiap SKA yang diterbitkan Kadin terakreditasi adalah sebagai berikut:

- Kadin Kabupaten Kota:
  - 80% untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - 10% untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan;
  - 10% untuk Kadin Indonesia
- Kadin Provinsi:
  - 90% untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan;
  - 10% untuk Kadin Indonesia
- Khusus Kadin Jakarta:
  - 60% untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan;
  - 40% untuk Kadin Indonesia

### **207. Buku Direktori Organisasi dan Layanan Kadin Indonesia**

Pembuatan buku ini ditujukan untuk:

- a. Menginformasikan keputusan keorganisasian Kadin Indonesia kepada masyarakat luas.
- b. Menginformasikan perkembangan organisasi Kadin Indonesia.
- c. Program-program unggulan kepengurusan Kadin Indonesia
- d. Layanan-layanan yang diterapkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
- e. Daftar pengurus dan sekretariat beserta kontak pointnya.

### **208. Database Perusahaan Anggota Kadin**

Melanjutkan pembuatan software data base keanggotaan secara online. Database ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

- a. Informasi mengenai data perusahaan anggota Kadin secara real time.
- b. Memudahkan untuk pengambilan keputusan dan pengolahan data lebih lanjut dengan adanya klasifikasi sektor usaha.
- c. Memudahkan untuk melakukan pemetaan dan promosi sektor usaha unggulan pada suatu daerah.
- d. Memudahkan laporan dari Kadin Kabupaten/Kota kepada Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia.
- e. Memudahkan pihak lain untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan anggota Kadin.

### **209. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 1/1987**

Melanjutkan memperjuangkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan operasional Kadin berdasarkan Undang-Undang 1/1987. Dengan adanya PP tersebut diharapkan penataan organisasi pengusaha dan perusahaan, pelimpahan tugas dari Pemerintah kepada Kadin dan lainnya dapat diatur lebih baik lagi, sehingga Kadin mampu memfungsikan dirinya sesuai dengan pasal 7 UU No 1/1987. Alternatif peraturan pelaksanaan tersebut adalah Peraturan Presiden.

### **210. Training Kewirausahaan bekerjasama dengan Asosiasi/Himpunan**

Dalam rangka menciptakan 1 juta entrepreneur baru di Indonesia maka Pokja pengembangan Entrepreneur melalui Asosiasi/Himpunan melanjutkan program pelatihan yang mencakup materi tentang bagaimana memulai sebuah bisnis, feasibility study, pengenalan pemasaran, permodalan. Untuk penajaman jenis bisnis berdasarkan sektor usaha, maka dilakukan kerjasama dengan asosiasi sektoral yang terkait.

### **211. Keorganisasian**

**a. Munas V Kadin**

Sebagai kegiatan yang dilaksanakan 5 (lima tahun) sekali yang bertujuan untuk evaluasi pelaksanaan rencana kerja 2004-2009 dan penyusunan program kerja 2009-2014, sekaligus pemilihan kepengurusan baru.

**b. Monitoring Pelaksanaan Muprov Kadin 2008-2009**

Kadin Provinsi yang habis masa kepengurusannya adalah Jambi, Maluku Utara, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku, NTB, Kalimantan Barat dan Papua

**c. Rakornas Bidang Organisasi 2008/2009**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapimnas Kadin 2008 dan untuk persiapan pelaksanaan Munas V Kadin, maka masalah keorganisasian dan keanggotaan perlu dibahas secara khusus dalam Rakornas Bidang Organisasi.

**d. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan**

Melakukan monitoring Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin agar terlaksananya tertib organisasi/keanggotaan.